

Prof. Burhanuddin Muhtadi, S.Th.I., M.A., Ph.D.

Guru Besar bidang Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta

VOTES FOR SALE

Klientelisme,
Defisit Demokrasi,
dan Institusi





Rapat Senat Terbuka dalam
Rangka Pengukuhan Guru Besar

Prof. Burhanuddin Muhtadi, S.Th.I., M.A., Ph.D.

Guru Besar bidang Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta

Judul Pidato

**VOTES FOR SALE:
KLIENTELISME, DEFISIT DEMOKRASI,
DAN INSTITUSI**

Jakarta, Rabu, 29 November 2023

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Pidato

Klientelisme Elektoral dan Relasional	9
Proliferasi Politik Uang	11
Perbandingan Global	17
Normalisasi Politik Uang	19
Faktor Determinan Politik Uang: Pemilih Partisan Problem atau Solusi?	21
Target Operasi Politik Uang: Pemilih Partisan atau Mengambang?	31
Mengapa Distribusi Politik Uang Salah Sasaran?	36
Efek Politik Uang, Persaingan Internal dan Teori Selisih Kemenangan	41
“Dilema Tahanan” dan Tekanan Politik Uang	44
Desain Institusi, Sistem Pemilu dan Pola Distribusi Patronase	48
Kesimpulan: Dari Desain Institusi Klientelistik ke Programatik	56

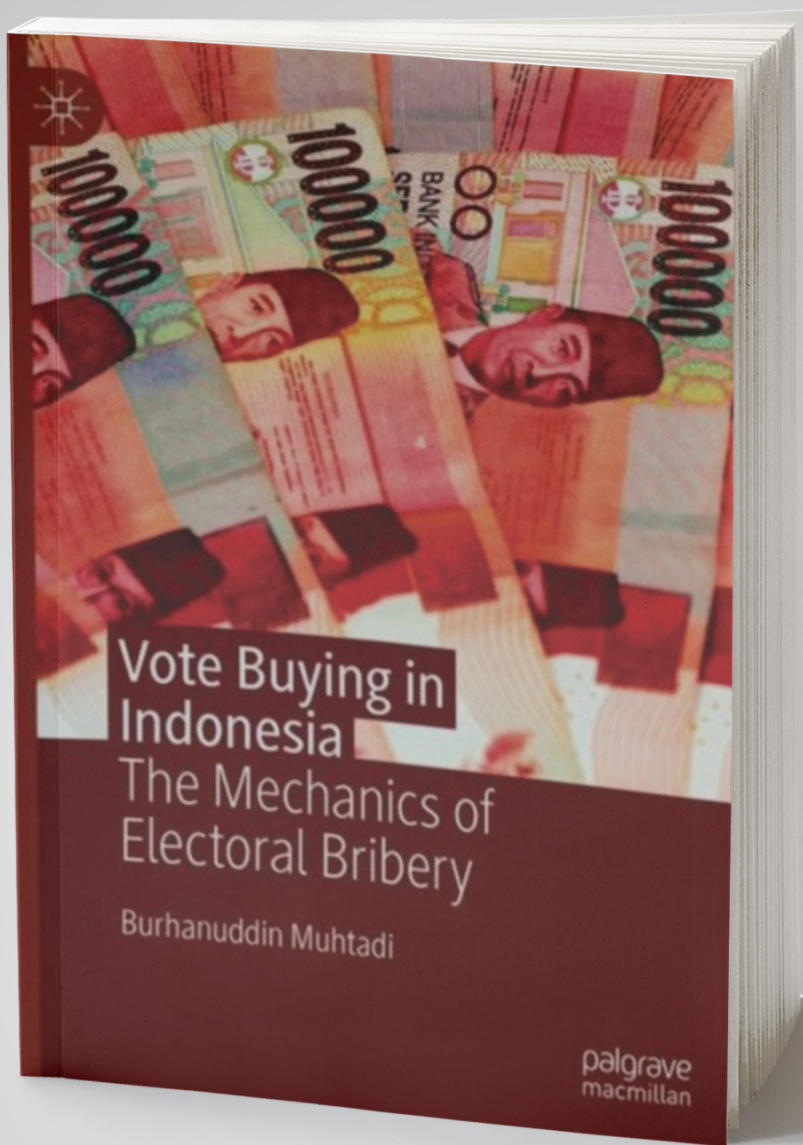
Daftar Appendiks **62**

Lampiran 1	62
Lampiran 2	63

Referensi **64**

Testimoni Para Ahli dan Asosiasi Dunia **69**

<i>Profil Singkat Burhanuddin Muhtadi</i>	73
<i>Curriculum Vitae</i>	77



**Vote Buying in
Indonesia**
The Mechanics of
Electoral Bribery

Burhanuddin Muhtadi

palgrave
macmillan

VOTES FOR SALE

KLIENTELISME, DEFISIT DEMOKRASI, DAN INSTITUSI

Prof. Burhanuddin Muhtadi, S.Th.I., M.A., Ph.D.

Al-Salâmu'alaykum Wr. Wb.

Bismillâh al-hamdulillâh al-shalâtu wa al-salâmu 'alâ rasulillâh wa 'alâ âlihi wa shahbihi wa man wâlah. Ammâ ba'd:

- *Yang amat terpelajar Ketua Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;*
- *Yang amat terpelajar Sekretaris Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;*
- *Yang amat terpelajar Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;*
- *Yang amat terpelajar para anggota Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;*
- *Yang amat terpelajar para Wakil Rektor, para Dekan Fakultas, dan Direktur Sekolah Pascasarjana, di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;*
- *Yang amat terpelajar para pejabat struktural, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;*
- *Yang amat terpelajar para tamu undangan dan hadirin yang kami muliakan*

Mari kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita hari ini sehingga kita bisa berkumpul di Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tempat yang sangat bersejarah ini. Sebagai pertanggungjawaban ilmiah saya sebagai Guru Besar Ilmu Politik, hari ini saya akan menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar saya dengan judul **“Votes for Sale: Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi.”**

Pidato pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Politik ini saya persembahkan untuk ayah saya, H. Muhtadi. Beliau adalah mentor terbaik dan “profesor” politik pertama saya. Sebenarnya saya sangat berharap beliau hadir di ruangan yang mulia ini, meski barang sejenak, menyaksikan putranya sekaligus “muridnya” mengenakan jubah dan toga Guru Besar. Namun sayang beliau berpulang ke Rahmatullah pada awal Februari 2021 karena keganasan COVID-19.

Saya mengenal politik sebagai nilai, pengabdian dan panggilan hidup dari ayah saya. Ketika saya masih kecil, saya diajak keliling kampanye di seluruh pelosok Rembang. Saya ingat diajak ayah naik vespa tua mendatangi lokasi-lokasi kampanye sebagai juru kampanye Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jelang Pemilu 1982, 1987, dan 1992. Ayah dikenal warga sebagai singa podium yang berpidato dengan meledak-ledak. Berkat kepiawaiannya tersebut, beliau sempat diminta jadi juru kampanye PPP tingkat provinsi. Ayah juga dikenal sebagai sosok yang pemberani yang tanpa *tedeng aling-aling* mengkritik kebijakan Orde Baru. Urat takut sepertinya sudah putus dalam dirinya. Tentu tidak mudah menjadi aktivis PPP di masa ketika seluruh kekuatan birokrasi, dan militer dimobilisasi untuk kepentingan *status quo*. Uniknya, meski aktif berpolitik, ayah sama sekali tidak tergiur menjadi caleg. Tawaran maju sebagai wakil rakyat selalu ia tolak halus. Hal ini tidak mengurangi sedikitpun semangat dan pengorbanannya untuk partai. Ia tipikal aktivis partai yang meyakini bahwa politik adalah sarana perjuangan, dan rela memberikan segalanya, termasuk uang, waktu dan tenaga untuk partai yang ia cintai, meski tanpa imbalan apapun.

Bagi ayah, politik tidak sekadar di arena politik formal. Meski dia tidak punya titel sebagai wakil rakyat, aktivitas sosialnya bejibun. Ayah aktif sebagai Bendahara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Rembang. Ia adalah penggagas kotak infaq NU jauh sebelum ada NU CARE-LAZISNU (Ronji 2021). Sejak SD kelas V hingga MTs kelas III, saya mengayuh sepeda keliling Rembang mengambil isi kotak yang dititipkan di rumah-rumah donatur tiap bulan. Sekarang kotak Koin NU yang bermula dari Kotak Infaq NU yang digagas ayah sudah meningkat 1000

kali lipat. Lebih dari 30.000 kotak dan dikelola melalui LAZISNU hingga tingkat ranting dengan donasi yang mencapai miliaran rupiah (Ronji 2021). Ayah juga aktif pada pendidikan Islam yang berafiliasi dengan NU seperti Madrasah Diniyah An-Nawawiyah dan Madrasah Mu'allimin Mu'allimat Rembang, tempat saya juga mencari ilmu agama. Ayah juga sibuk sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) cabang Rembang. Beliau diminta menjadi Ketua Paguyuban Persatuan Pedagang Pasar Rembang (PPPR), bahkan hingga akhir hayatnya ia menolak pemindahan pedagang pasar ke lokasi yang sepi. Sebelum pulang ke Rahmatullah, ayah beraudiensi dengan Bupati Rembang dan meminta saya mengatur pertemuan dengan fraksi-fraksi di DPR dan pejabat terkait di Jakarta.

Prinsip yang dipegang ayah: politik adalah sebuah pengabdian sekaligus panggilan. Ia adalah representasi aktivis partisan dan ideologis yang bersedia melakukan apapun untuk prinsip politik yang ia yakini. Dalam leksikon ilmu politik, sikap partisan mendorong pemilih untuk aktif membantu partai yang mereka dukung secara sukarela. Raksasa ilmu politik Russel J. Dalton (2016: 8) menemukan pemilih partisan di Amerika Serikat cenderung aktif berkampanye dengan mengajak orang lain, mengirimkan alat peraga kampanye dan mengambil bagian dalam acara kampanye, bahkan menyumbang uang ke partai selama pemilu. Lebih jauh Dalton mengatakan pemilih partisan dengan tingkat *party ID* (identifikasi psikologis pemilih pada partai tertentu) yang tinggi cenderung menggunakan hak suara 26% lebih tinggi daripada pemilih non-partisan. Verba dan Nie (1972: 219–220) juga menunjukkan bahwa sikap partisan turut berjasa mendorong keterlibatan politik warga kelas menengah bawah. Jika mereka tidak memiliki sikap partisan, kata Verba dan Nie, kemungkinan besar mereka akan absen dalam politik. Pola ini juga ditemukan di negara-negara demokrasi mapan lainnya. Pada Pemilu Bundestag 2009 di Jerman, pemilih yang memiliki *party ID* yang tinggi bukan hanya berbondong-bondong ke bilik suara, tapi juga efektif dalam menggerakkan mesin kampanye partai dengan biaya murah (Dalton 2016: 8).

Saya ingin menguji apakah betul sikap partisan bisa menurunkan ongkos politik seperti yang ditunjukkan ayah saya yang rela memberikan segalanya untuk partai yang ia cintai? Dalam politik padat modal seperti di Indonesia saat ini, penting menginvestigasi sejauhmana kedekatan pemilih terhadap partai yang menjadi indikator pemilih partisan dan ideologis punya kontribusi dalam usaha memurahkan politik biaya tinggi. Salah satu variabel yang mempermahal politik elektoral di Indonesia adalah praktik klientelistik di mana politisi memberikan

insentif material kepada pemilih jelang pemilu. Studi ini ingin menguji sejauhmana pemilih partisan imun terhadap godaan politik uang, dan sejauhmana kelembagaan partai dan sistem pemilu kita mendorong meluasnya praktik jual beli suara.

01

Klientelisme Elektoral dan Relasional

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Sejak gelombang demokratisasi ketiga dan keempat melanda dunia pada 1970-an (Huntington 1991), pemilu telah menjadi norma di seluruh dunia. Sekarang, lebih dari 90% negara di dunia menggunakan pemilu multipartai yang kompetitif dalam memilih pemimpin (Van Ham dan Lindberg 2015). Namun kualitas pemilu di negara-negara demokrasi baru masih diwarnai dengan berbagai bentuk kecurangan dan malapraktik elektoral. Salah satu jenis manipulasi elektoral yang jamak terjadi di negara-negara demokrasi baru adalah praktik jual beli suara. Ironisnya, alih-alih mengurangi praktik transaksional ini, fase transisi dari rezim otoriter ke demokrasi di Indonesia justru mendorong proliferasi politik uang. Pada transisi menuju demokrasi, banyak lembaga demokrasi, termasuk partai politik, masih lemah, sehingga mendorong para politisi menggunakan strategi klientelisme.

Klientelisme terbagi menjadi dua: klientelisme relasional dan elektoral.

Klientelisme relasional melibatkan hubungan berkelanjutan (meskipun asimetris) dan saling ketergantungan (Scott 1969; Auyero 2001). Hicken (2011: 290–294) menyatakan dalam klientelisme relasional pertukaran material bersifat kontingensi, hierarki, dan iterasi, dan karenanya tidak sebatas pada masa kampanye. Sebaliknya, klientelisme elektoral melibatkan pemberian imbalan oleh politisi kepada pemilih secara eksklusif selama kampanye pemilu (Stokes 2005; Schaffer & Schedler 2007; Dunning & Stokes 2008; Muhtadi 2018a; Muhtadi 2019b; Hicken et al 2022).

Seiring dengan menurunnya hubungan patron-klien di Indonesia, strategi klientelistik yang terjadi pada masa pemilu pada umumnya bersifat elektoral ketimbang relasional. Studi-studi saya tentang politik uang menunjukkan bahwa relasi antara kandidat dan timses dan antara timses dengan pemilih dalam rangka distribusi material jelang pemilu pada umumnya bersifat *one-off interaction*, jangka pendek dan transaksional ketimbang hubungan pertukaran yang bersifat jangka panjang atau kontraktual (Muhtadi 2018a; Muhtadi 2019a; Muhtadi 2019b). Karena itu, dalam naskah ilmiah ini, saya mendefinisikan politik uang secara luas yang melibatkan pertukaran klientelistik atau non-klientelistik sekaligus. Jadi politik uang adalah “usaha terakhir dalam mempengaruhi keputusan pemilih dalam memberikan suara di pemilu, yang dilakukan beberapa hari atau bahkan beberapa jam sebelum pemungutan suara, dengan cara memberikan uang tunai, barang, atau imbalan material lainnya kepada pemilih” (Muhtadi 2018a; Muhtadi 2019a).

02

Proliferasi Politik Uang

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Pertanyaan pertama yang ingin dijawab adalah seberapa besar praktik politik uang terjadi di Indonesia? Pada 2010, pertama kali saya tertarik mengkaji topik ini, isu politik uang sudah populer didiskusikan di dunia akademik, aktivis LSM dan media massa. Namun kajian ini saat itu lebih bersifat jurnalistik dan anekdot. Kalaupun ada karya ilmiah tentang politik uang, sebagian besar didasarkan pada pendekatan kualitatif (misalnya Choi 2007; Hidayat 2007; Hadiz 2010; Aspinall dan Sukmajati 2016). Meskipun sangat berguna dalam meningkatkan pemahaman kita tentang politik uang, telaah kualitatif semacam ini tidak dapat mengukur besaran, pola, dan efek politik uang terhadap pilihan (Gonzalez-Ocantos et al. 2012: 203). Akibatnya, kita sulit menentukan dengan pasti berapa banyak insiden politik uang terjadi di Indonesia.

Kegelisahan saya di atas terkonfirmasi ketika saya mengikuti *workshop* “Money Politics, Vote Buying and Clientelism in Southeast Asia” di Bali yang diadakan oleh Centre for Democratic Institutions pada 2011. *Workshop* ini dihadiri oleh para pelopor kajian klientelisme dari kampus-kampus top di Amerika Serikat, Eropa dan Australia. Pertanyaan yang kerap terdengar dalam *workshop* tersebut adalah jika benar politik uang menjadi strategi elektoral yang makin populer di Indonesia, mengapa studi klientelisme yang menjadi rujukan akademik dunia tidak datang dari Indonesia, tapi justru berasal dari studi-studi di Amerika Latin dan Afrika? Inilah yang memotivasi saya melakukan studi pertama mengenai politik uang secara sistematis untuk mengisi ruang kosong dalam literatur tentang

klientelisme di Indonesia, dan menempatkannya dalam peta perbandingan di dunia. Keberuntungan saya berlanjut ketika diajak dalam riset kolaboratif mengenai klientelisme di empat negara Asia Tenggara yang dikomandani empat akademisi kelas dunia Edward Aspinall, Allen Hicken, Meredith Weiss, dan Paul Hutchcroft. Tak hanya itu, saya juga langsung berguru kepada Edward Aspinall ketika menuntaskan studi doktoral mengenai politik uang di Australian National University (ANU) pada 2013-2018.

Untuk menjawab pertanyaan yang menghantui para sarjana mengenai seberapa banyak warga yang terlibat dalam praktik jual beli suara, saya memakai metode survei yang representatif (Muhtadi 2019b). Memang metode ini bukannya tanpa kelemahan, karena banyak pemilih yang terpapar politik uang tidak mengakui telah menerima insentif material (Brusco et al. 2004: 69). Politik uang merupakan malapraktik elektoral yang melanggar norma sosial di banyak negara dan karena itu memunculkan stigma sosial negatif (Hicken 2007b; Gonzalez-Ocantos et al. 2012; Corstange 2012). Untuk itu, saya menggunakan sejumlah pengukuran politik uang dengan beragam teknik untuk mengungkap jawaban responden secara secara langsung atau obtrusif hingga yang paling halus. Saya juga memakai pertanyaan tak langsung di mana responden diperlakukan sebagai “pengamat” untuk mengevaluasi praktik politik uang di lingkungan mereka. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode eksperimen—mode penelitian kuantitatif modern yang semakin efektif dalam menyelidiki klientelisme dan dimaksudkan untuk mengurangi bias dalam pertanyaan survei. Semua pengukuran yang saya pakai dalam survei pasca-pemilu 2014 dan 2019 memakai standar internasional, sehingga bisa dibandingkan dengan negara-negara lain.

Tabel 1 menunjukkan antara 25% hingga 33% pemilih terpapar praktik haram ini tergantung pengukuran yang dipakai. Perlu dicatat bahwa di Pemilu 2014 terdapat 187 juta yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan demikian, 33% itu setara 62 juta orang Indonesia pernah ditawarkan politik uang. Dengan kata lain, satu dari tiga orang Indonesia yang memiliki hak pilih pernah terpapar politik uang. Pada Maret 2014, sebulan sebelum pencoblosan, hanya 10,7% yang mengaku ditawarkan politik uang. Ini menunjukkan bahwa politik uang semakin terkonsentrasi pada jam-jam atau hari-hari sebelum pemilu, atau bahkan pada hari pemilu itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, peristiwa ini disebut “serangan fajar”, sebuah istilah yang menunjukkan bahwa keuntungan material, terutama uang tunai, diberikan sebagai kompensasi suara pada hari pemungutan suara tepat

setelah Shubuh. Banyak calon dan timses yang percaya bahwa semakin dekat hari pemungutan suara, semakin kuat pengaruh politik uang terhadap keputusan elektoral.

TABEL 1
TINGKAT POLITIK UANG BERDASARKAN BERBAGAI PENGUKURAN

JENIS PEMILU	NAMA VARIABEL	% 'YA' DALAM SAMPEL TOTAL
PEMILU LEGISLATIF	1. Skala empat poin politik uang dalam pemilu legislatif	33,1
	2. Skala tiga poin politik uang dalam pemilu legislatif	29
	3. Skala dua poin politik uang tingkat individu dalam Pemilu Legislatif 2014	25
	4. Skala dua poin politik uang tingkat warga dalam Pemilu Legislatif 2014	28,9
PEMILIHAN KEPALA EKSEKUTIF TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH	1. Skala tiga poin politik uang dalam pemilu presiden	8,1
	2. Skala tiga poin politik uang dalam pemilihan gubernur	11,3
	3. Skala tiga poin politik uang dalam pemilihan bupati/ walikota	13,6

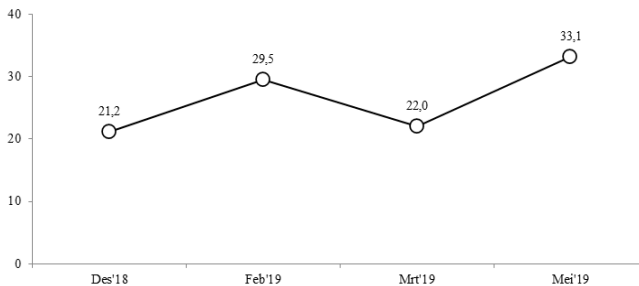
Survei juga menunjukkan bahwa operator politik uang berasal dari semua partai. Hasil survei ini sesuai dengan pengamatan kualitatif yang saya lakukan. “Tidak ada partai yang suci dalam transaksi jual beli suara. Bahkan calon dari partai-partai Islam juga terlibat dalam praktik semacam itu,” kata seorang mantan anggota DPR dalam wawancara dengan saya. “Saya taruhan, potong jari saya jika ada anggota DPR/DPRD di Indonesia saat ini yang terpilih tanpa membeli suara!”. Meskipun politik uang juga biasa dilakukan calon yang maju melalui partai-partai Islam, empat terbesar pembeli suara datang dari partai non-agama. Di antara pemilih yang mengaku ditawari uang, 32,2% diiming-imingi imbalan calon Golkar, lalu disusul PDI-P (26,5%), Gerindra (25%), dan Demokrat (18,4%). Pemberian barang paling sering dalam bentuk uang (75,5%), sembako seperti beras, gula, dan mi (12,8%), serta perkakas rumah tangga (11,4%).

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Pada Pemilu 2019, saya juga melakukan survei pasca-pemilu, yakni pada 11–17 Mei 2019. Dengan bekerjasama dengan ANU, kami mewawancarai 1,210 responden yang dipilih melalui metode *multistage random sampling*, dengan *margin of error* $\pm 2.9\%$ pada tingkat derajat kepercayaan 95%. Kami memakai pertanyaan empat skala tanpa menyebut secara langsung 2019: “Dalam beberapa tahun belakangan, berkaitan dengan kampanye pemilihan calon anggota DPR, seberapa sering calon atau orang dari partai politik tertentu yang pernah menawari Ibu/Bapak barang, uang atau hadiah agar calon tersebut dipilih dalam pemilu?” Jawaban responden dalam empat skala Likert (sangat sering, cukup sering, jarang, dan tidak pernah). Harapannya, pertanyaan ini mampu memotret seluruh pengalaman menerima tawaran politik uang, termasuk berdasarkan pemilu 2019 yang baru berlangsung. Dengan tidak menyebut secara eksplisit Pemilu 2019, responden tidak merasa “diinterogasi” karena politik uang bersifat ilegal. Total mereka yang menjawab “sangat sering, sering, dan jarang” mencapai 33,1%, sama persis dengan temuan 2014.

Temuan tentang politik uang di Pemilu Legislatif 2019 maupun 2014 memiliki pola yang sama, yakni semakin mendekati pemilu, insiden politik uang semakin besar. Pada survei nasional Desember 2018, empat bulan sebelum pemilu, 21,2% memilih mengaku “sangat sering”, “cukup sering” atau “jarang” ditawarkan uang, lalu meningkat menjadi 29,5% di Februari 2019. Mereka yang menjadi sasaran malapraktik elektoral ini sedikit turun di Maret 2019 menjadi sekitar 22%. Namun demikian, responden yang mengaku ditarget politik uang kembali naik tajam hingga 33,1% pada survei pasca-pemilu 2019 (lihat Grafik 1).

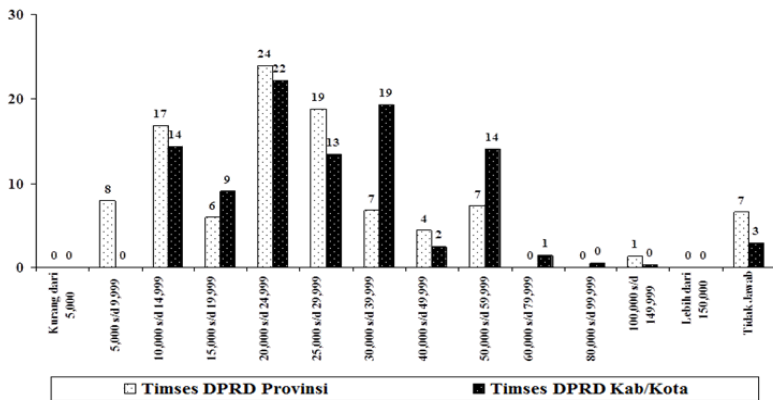
GRAFIK 1
PENETRASI POLITIK UANG JELANG PEMILU 2019 (%)



Sumber: Survei Desember 2018, Februari 2019 dan Maret 2019 dilakukan Indikator, survei pasca-pemilu pada Mei 2019 oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Adapun besaran uang yang diberikan, saya menemukan setidaknya tiga variasi yang menentukan besar-kecilnya jumlah uang yang diberikan: *Pertama*, variasi antar-wilayah. Pemilih di Jawa umumnya “lebih murah” harganya ketimbang pemilih di luar Jawa. Hal ini terkait dengan populasi pemilih di Jawa yang lebih padat dan geografi yang lebih terjangkau sehingga caleg tak perlu mengeluarkan ongkos logistik yang terlalu mahal. Tak kalah penting adalah moral ekonomi politik uang yang membuat praktik ini, bagi orang Jawa, tidak dilihat semata-mata sebagai pertukaran komoditas (suara) dengan uang, tapi sebagai praktik budaya yang bersifat resiprokal: karena caleg membutuhkan dukungan pemilih, maka caleg harus pengertian dengan memberikan imbalan ala kadarnya sebagai tanda terima kasih (*gift-giving*). *Variasi kedua*: “harga” penduduk desa pada umumnya lebih terjangkau ketimbang pemilih perkotaan. *Terakhir*, adalah variasi antar-caleg. Banyak caleg yang memiliki “gizi” tinggi mengeluarkan amplop lebih banyak dan lebih besar dari “harga pasaran” pemilih yang berlaku di suatu wilayah.

GRAFIK 2
JUMLAH UANG YANG DISALURKAN TIMSES PER-PEMILIH (%)



Survei timses yang saya lakukan di empat provinsi—Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara— menemukan temuan yang lebih sistematis tentang besaran amplop yang diberikan caleg¹. Survei timses menunjukkan bahwa jumlah uang yang diberikan kepada pemilih sangat bergantung pada konstituensi. Pola ini terlihat secara jelas di Grafik 2. Jika dibandingkan dengan timses di tingkat

kabupaten/kota, amplop yang disebar oleh timses untuk caleg di tingkat provinsi biasanya lebih kecil, dengan biaya rata-rata di bawah Rp. 25,000 per pemilih. Ini karena pemilih di tingkat provinsi membutuhkan lebih banyak suara daripada pemilih di tingkat kabupaten atau kota untuk lolos. Saya melakukan wawancara dengan beberapa caleg tingkat DPR Pusat dan menemukan pola yang sama: jumlah uang yang diperlukan untuk setiap pemilih lebih kecil daripada jumlah amplop yang diperlukan untuk caleg tingkat provinsi. Alasannya sederhana: untuk mencapai kemenangan, caleg dari DPR Pusat membutuhkan ratusan ribu suara.

Pengeluaran total untuk caleg DPR Pusat jauh lebih besar ketimbang untuk caleg di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, meskipun harga per amplohnya lebih rendah, karena jumlah dukungan yang diperlukan untuk terpilih. Dalam Pemilu 2014 lalu, seorang caleg dari partai Islam yang maju di Jawa mengaku telah mengeluarkan paket 450 ribu amplop dengan harga mulai dari 10.000 hingga 20.000 per amplop (Wawancara, 20 April 2014). Dengan harga rata-rata per amplop 15.000, dia harus mengeluarkan setidaknya 6.755.000.000 rupiah untuk operasi politik uang. Ini belum termasuk biaya logistik dan distribusi, serta amplop yang harus dia sediakan untuk kerja sama dengan caleg DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Salah satu caleg yang terpilih mengatakan bahwa Pemilu 2014 adalah kontestasi elektoral paling mahal yang pernah dia ikuti. “Saya telah maju tiga kali sebagai caleg sejak 2004,” katanya, “tapi Pemilu 2014 adalah pemilu paling brutal sepanjang sejarah.” Pada saat wawancara dengan saya, ia terlihat begitu emosional. Dia tampak menahan air mata dan suaranya tercekak ketika teringat saudaranya yang menangis di hadapannya karena merasa bersalah tidak mampu membantu sang caleg secara finansial.

¹Selama ini, penelitian tentang timses banyak didasarkan pada sampel yang kurang representatif. Saya tidak memiliki kerangka sampel timses sebagai referensi untuk pengambilan sampel. Untuk mencapai tujuan ini, saya menggunakan data dari para caleg terpilih untuk mendapatkan populasi timses di empat provinsi tersebut. Pertama, sampel dipilih secara acak dari caleg DPRD tingkat provinsi dari setiap dapil. Tiga timses yang membantu para caleg di pemilu 2014 dipilih secara acak untuk setiap caleg DPRD provinsi. Proses pemilihan bergantung pada daftar timses yang disebutkan oleh para caleg sampel. Jadi, ada 100 anggota DPRD Provinsi yang terpilih sebagai sampel dan 300 broker tingkat provinsi yang menjawab. Untuk mendapatkan sampel caleg terpilih DPRD Kabupaten/Kota dan timses, ikuti langkah-langkah berikut: Pertama, anggota DPRD tingkat dua dari setiap provinsi dibagi menjadi empat zona. Saya memilih kabupaten atau kota yang berbeda untuk setiap zona. Ada sepuluh kabupaten dan kota setiap provinsi. Di setiap provinsi, 50 caleg anggota DPRD kabupaten/kota dipilih sebagai sampel, sehingga total 200 anggota DPRD yang disurvei. Selain itu, timses yang terdiri dari 600 orang dipilih secara acak.

03

Perbandingan Global

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Sebagaimana diindikasikan sebelumnya, saya menggunakan pengukuran yang bisa diperbandingkan dengan tingkat politik uang di negara-negara lain: “Selama beberapa tahun belakangan, berkaitan dengan kampanye pemilihan calon anggota DPR, seberapa sering calon atau orang dari partai politik tertentu yang pernah menawari Ibu/Bapak barang, uang, atau hadiah agar calon tersebut dipilih dalam pemilu?” Pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan yang diajukan oleh Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer dan Afrobarometer. Seluruh data mengenai tingkat politik uang dari negara-negara Amerika Latin dan Afrika yang disajikan dalam Tabel 2 diambil dari dua asosiasi polling terkemuka di dunia ini.

Tabel 2 menunjukkan perbedaan signifikan dalam tingkat transaksi politik uang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin selama sepuluh tahun terakhir. Tingkat politik uang global rata-rata adalah 14,22%; beberapa negara jauh di bawah rata-rata, tetapi sebagian negara yang lain jauh di atas rata-rata. Uganda (41%), Benin (37%), Indonesia (33%), Kenya (32%), Liberia (28%), Swaziland (27%), Mali (26%), dan Nigeria (24%). Secara umum, frekuensi politik uang lebih tinggi di banyak negara Afrika dan Asia daripada di Amerika Latin. Ini sejalan dengan temuan sebelumnya (Schaffer, 2007). Tingkat politik uang Indonesia dua kali lipat lebih tinggi dari rata-rata dunia, yaitu sebesar 33%, dan menempati peringkat ketiga politik uang di dunia.

TABEL 2
TINGKAT POLITIK UANG NEGARA-NEGARA DI DUNIA

NEGARA	%	N	NEGARA	%	N
Uganda 2012	41	2400	Zambia 2012	13	1200
Benin 2012	37	1200	Peru 2010	12	1500
Indonesia 2014 & 2019	33	1210	Venezuela 2010	12	1500
Kenya 2011	32	2399	Guinea 2013	11	1200
Liberia 2012	28	1199	Senegal 2013	11	1200
Swaziland 2013	27	1200	El Salvador 2010	10	1550
Mali 2012	26	1200	Togo 2012	10	1200
Niger 2013	24	1200	Costa Rica 2010	9	1500
Sierra Leone 2012	23	1190	Ekuador 2010	8	3000
Rep. Dominika 2010	22	1500	Suriname 2010	7	1516
Burkina Faso 2012	22	1200	Pantai Gading 2013	7	1200
Maroko 2013	22	1200	Ghana 2012	7	2400
Filipina 2013	22	1200	Malaysia 2013	7	NA
Mesir 2013	20	1200	Nicaragua 2010	6	1540
Nigeria 2012	19	2400	Botswana 2012	6	1200
Zimbabwe 2012	19	2400	Cape Verde 2011	6	1208
Argentina 2010	18	1410	Jamaica 2010	6	1504
Panama 2010	18	1536	Afrika Selatan 2011	6	2399
Belize 2010	17	1504	Guyana 2010	6	1540
Bolivia 2010	17	3018	Uruguay 2010	6	1500
Mexico 2010	17	1562	Chile 2010	6	1965
Paraguay 2010	16	1502	Trinidad & Tobago 2010	5	1503
Burundi 2012	16	1199	Mozambique 2012	5	2400
Kolombia 2010	15	1506	Honduras 2009	4	1005
Kamerun 2013	14	1200	Aljazair 2013	3	1206
Malawi 2012	14	2407	Lesotho 2012	2	1197
Tanzania 2012	14	2400	Mauritius 2012	1	1200
Guatemala 2010	14	1504	Tunisia 2013	1	1200
Brazil 2010	13	2482			
Madagascar 2013	13	1200	RATA-RATA	14,22	

Sumber: LAPOP Americas Barometer 2010 dan Afrobarometer Putaran 5, 2011–2012.

04

Normalisasi Politik Uang

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Barangkali ada yang ragu apakah metode survei mampu mengungkap prevalensi jual beli suara karena praktik ini dianggap tabu dan melanggar hukum. Untuk menghindari kesan “menginterogasi” responden, para ahli politik menggunakan metode eksperimen dengan menggunakan sejumlah pertanyaan yang tidak langsung dan terselubung. Metode ini memungkinkan Gonzalez-Ocantos et al. (2012) menemukan perbedaan yang signifikan antara hasil survei dengan metode eksperimen dan survei dengan pertanyaan langsung di Nicaragua. Hal ini juga terjadi di Lebanon (Corstange 2012) dan Honduras (De Jonge 2015), di mana metode eksperimen menghasilkan hasil yang lebih baik daripada metode pertanyaan langsung. Uniknya, studi saya pada tahun 2019 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara metode eksperimen dan metode survei observasional (Muhtadi 2019b). Malapraktik elektoral ini sudah menjadi sesuatu yang lazim di mata pemilih di Indonesia. Pemilih tak segan-segan mengakui meskipun ditanya secara langsung dalam survei.

Tidak seperti sebelumnya, praktik ini telah mengalami normalisasi. Saya menyaksikan peningkatan popularitas istilah seperti “NPWP” dan “Golput” di kalangan pemilih selama kampanye Pemilu 2014. “Golput”, yang biasanya merujuk pada pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya, dipelesetkan menjadi “golongan penerima uang tunai”, sementara NPWP yang merupakan singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak, dipelesetkan menjadi *Nomer Piro, Wani Piro*, yang diambil dari bahasa Jawa, yang berarti caleg “berani bayar berapa agar pemilih

memilih nomor urut mereka.” Juga singkatan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang diplesetkan Kasih Uang Habis Perkara.” Meskipun politik uang secara resmi ilegal, pembelian suara makin dianggap sebagai hal biasa selama pemilu dan jarang dituntut secara hukum. Pemilih sekarang melihat pemilu sebagai “musim panen uang” (*season of money*), menurut istilah Corstange (2012: 483). Penelitian lapangan saya selama 13 bulan pada saat puncak Pemilu 2014 dan 2019 menemukan bahwa banyak politisi yang menyesalkan meningkatnya tuntutan kepada mereka untuk melakukan pembelian suara. Mereka mengkritik sikap pemilih yang menganggap bahwa siapa pun yang terpilih, apapun partainya, kemungkinan besar akan melupakan konstituennya segera setelah pemilu. Akibatnya, pemilu sering dianggap pemilih sebagai kesempatan yang jarang dimiliki oleh orang biasa untuk “menghukum” dan mengembalikan hak yang dicuri oleh politisi atas dana publik (Kerkvliet 1991: 231). Dalam bahasa Schaffer dan Schedler (2007: 26), para penaja suara umumnya memandang uang yang mereka terima sebagai “kompensasi atas kesalahan para politisi [yang mereka lakukan terhadap pemilih] di masa lalu.”

Sebuah pepatah mengatakan bahwa tari tango hanya dapat dilakukan oleh dua orang. Bukan hanya pemilih yang mata duitan yang menyebabkan politik uang masif, tetapi juga caleg yang terlibat dalam praktik jual beli suara ini juga turut bertanggung jawab. Dua caleg yang saya wawancarai mengutip pernyataan seorang kiai di Jawa Tengah, yang merupakan anggota Dewan Syuro sebuah partai. Sang kiai mengutip dalil dalam kitab, yang dalam pandangannya membolehkan melakukan praktik pembelian suara. Dalil tersebut berbunyi: الرشوة حرام وخرج عن ذلك لأجل عدل (menyuap pemilih pada dasarnya haram, tapi hal itu bisa diperbolehkan demi keadilan). Karena caleg dari partai non-agama masif membeli suara, maka atas nama keadilan caleg dari partai Islam pun boleh melakukan hal yang sama. Sang kiai —yang menjabat pimpinan salah satu partai Islam— mengutip sebuah kaidah Ushul Fiqh, yaitu ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب Berdasarkan proposisi ini, tujuan utama pemilu adalah terpilihnya kandidat yang baik dan religius. Jika calon yang baik enggan membeli suara dan akibatnya kalah, maka parlemen akan diisi politisi yang korup. Dengan kata lain, jika syarat agar terpilih harus dengan cara menabur uang, maka politik uang menjadi sebuah keniscayaan (Wawancara, 12 Agustus 2014).

Stigma negatif politik uang yang awalnya melekat menjadi melemah akibat dari “normalisasi” ini. Seorang politisi dari Golkar menyatakan dalam wawancara bahwa “praktik jual beli suara telah menjadi rahasia umum di Indonesia, [dan] dianggap sebagai bagian dari tradisi selama pemilu. Memang di atas kertas [politik

uang] ilegal, tetapi saya yakin polisi tidak akan memprosesnya. Jika diproses, saya yakin penjara akan penuh” (Wawancara, 23 April 2014). Nurul Arifin, caleg petahana Golkar yang populer tetapi gagal terpilih di 2014, mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan lawan internal partai ialah memberikan amplop lebih banyak kepada pemilih. Wajar jika kemudian aksi jual beli suara pada 2014, meminjam kata-kata seorang peneliti independen, terlihat “lebih masif, vulgar dan brutal” dibanding pemilu-pemilu sebelumnya (*Kompas.com*, 21 April 2014).

05

Faktor Determinan Politik Uang: Pemilih Partisan Problem atau Solusi?

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Setelah saya memaparkan temuan di atas, saatnya kita kembali menguji seberapa besar efek sikap partisan seperti yang dimiliki ayah saya dalam upaya menurunkan politik uang? Studi ini ingin membuktikan satu mazhab keserjanaan yang dominan bahwa pemilih ideologis yang memiliki sikap partisan tinggi akan mempermurah biaya kampanye karena mereka tak perlu diiming-imingi imbalan untuk aktif kampanye dan mencoblos partainya di bilik suara (Dalton 2016; Verba dan Nie 1972). Untuk itu, studi ini fokus faktor-faktor

determinan politik uang pada tingkat individu dan memberikan profil komprehensif tentang ‘penjual suara’ memakai dataset 2014 dibanding 2019 karena variabel-variabel independen yang diuji lebih lengkap ketimbang data 2019.

Saya menguji tiga teori yang dapat menjelaskan preferensi individu terhadap tawaran politik uang. *Pertama* dan terpenting, teori modernisasi. Banyak akademisi berpendapat bahwa elemen sosial-ekonomi seperti tingkat pendapatan dan pendidikan mempengaruhi seberapa besar insiden jual beli suara (Brusco et al. 2004; Vicente 2013). Pemilih yang lebih miskin dianggap lebih rentan terhadap praktik elektoral yang tidak etis daripada pemilih berkecukupan. Pendidikan adalah komponen penting modernisasi lainnya yang dianggap terkait dengan politik uang (Vicente 2013). Orang yang kurang berpendidikan dinilai lebih rentan terhadap pembelian suara daripada orang yang berpendidikan. Selain itu, perbedaan tempat tinggal pemilih dianggap mempengaruhi kemungkinan adanya klientelisme elektoral di mana warga pedesaan dinilai cenderung toleran politik uang ketimbang orang kota. *Kedua*, teori *civic engagement* (keterlibatan warga dalam organisasi sosial). Para aktor klientelistik sering menggunakan organisasi sosial untuk menyebarkan sumber daya patronase (Callahan 2005). Jika ini benar, kemungkinan seorang pemilih terpapar politik uang meningkat seiring keterlibatan mereka dalam organisasi sosial.

Ketiga, klientelisme elektoral juga mencakup sikap politik (*political attitudes*) yang terdiri dari berbagai komponen. Beberapa sarjana berpendapat bahwa pemilih yang tidak merasa dekat dengan partai tertentu atau pemilih yang mengambang cenderung menerima imbalan material. Efikasi politik juga merupakan komponen sikap politik. Banyak penelitian menunjukkan bahwa transaksi klientelistik menunjukkan efikasi warga yang rendah atau ekspresi keterasingan politik. Demikian pula, studi sebelumnya menunjukkan bahwa pemilih yang kurang informasi politik cenderung menjadi target pembelian suara. Literatur juga menunjukkan bahwa pemilih dengan minat politik yang rendah lebih rentan terhadap politik uang. Bersamaan dengan kepercayaan politik, muncul juga asumsi bahwa pemilih yang memiliki *political trust* yang rendah terhadap lembaga politik cenderung permisif terhadap politik uang. Selain itu, sejumlah penelitian tentang klientelisme elektoral menyatakan bahwa mengambil bagian dalam pemilihan umum meningkatkan kemungkinan terpapar politik uang. Terakhir, banyak sarjana percaya bahwa klientelisme bertentangan dengan demokrasi, yang berarti bahwa pemilih yang sangat mendukung demokrasi sebagai sistem pemerintahan akan menolak jual beli suara.

Khusus terkait sikap partisan sebagai prediktor yang potensial memprediksi politik uang, yang menjadi fokus studi ini, literatur klientelisme terbagi dalam dua kubu besar ketika membicarakan apakah pemilih yang punya sikap partisan atau pemilih mengambang yang lebih rentan terpapar politik uang. Dua aliran tersebut adalah pemilih-partisan atau inti (*core-voter*) versus pemilih-mengambang (*swing-voter*). Keterbatasan anggaran yang politisi miliki dan rezim pemilu rahasia (*secret ballot*) memaksa mereka berpikir strategis dalam menyalurkan insentif material kepada pemilih. Menurut madzab *core-voter*, partai cenderung menyasar pendukung sendiri dengan membagikan amplop atau barang lain (misalnya Nichter 2008; Stokes et al. 2013). Strategi ini disebut sebagai “pembelian partisipasi (*turnout buying*).” Jika pemilih yang setia tidak diberikan insentif, dikhawatirkan mereka tidak akan mencoblos. Namun, kubu *swing-voter* berpendapat sebaliknya. Partai-partai tidak akan menyia-nyiakan anggaran mereka yang terbatas untuk pendukung inti. Sebaliknya, mereka akan menggunakan anggaran ini untuk menarget pemilih mengambang atau basis lawan yang masih dapat dipengaruhi (Lindbeck dan Weibull 1987; Stokes 2005). Argumentasi ini berpusat pada argumen bahwa pemilih partisan atau inti sudah pasti mendukung dengan solid, sehingga tidak perlu insentif tambahan.

Cox dan McCubbins (1986) adalah ilmuwan pertama yang mengungkapkan teori pemilih inti. Alasan utama model pemilih inti adalah penghindaran risiko (*risk aversion*). Pemilih inti dianggap lebih responsif dan dapat diandalkan dibandingkan dengan pemilih mengambang karena politisi “sering melakukan kontak intensif dengan mereka dan tahu benar bagaimana mereka akan bereaksi [jika politisi tak memberikan insentif]” (Cox dan McCubbins 1986: 379). Menurut Cox dan McCubbins, politisi yang tidak mau mengambil risiko cenderung enggan menarget pemilih mengambang dan basis pendukung lawan karena kelompok pemilih ini belum tentu menghasilkan suara meskipun sudah diguyur uang, dan pada saat yang sama basis pemilih loyal partai justru akan marah jika mereka diabaikan. Cox dan McCubbins (1986) menciptakan istilah “ongkos pemeliharaan” (*maintenance buying*) untuk meyakinkan bahwa penyaluran insentif material kepada pemilih loyalis-partisan adalah strategi rasional bagi partai agar bisa mempertahankan hubungan jangka panjang dengan para pendukungnya. Gans-Morse et al. (2014: 4) menyebutnya sebagai strategi “menghadiahi loyalis” (*rewarding loyalist*) untuk mengunci pemilih inti karena mereka akan berkhianat jika tidak menerima ganjaran materi.

Temuan Cox dan McCubbins diperkuat oleh Nichter (2008), tetapi dengan fokus dan argumen yang berbeda. Nichter berpendapat bahwa pendukung pasif, atau mereka yang memiliki preferensi elektoral tetapi tidak militan, lebih cenderung menerima insentif elektoral karena tujuan utama politik uang adalah mobilisasi pemilih, bukan persuasi. Menurut Nichter, politisi yang menggunakan taktik politik uang tidak sedang mengubah preferensi pemilih di masa jelang pemilihan, tetapi justru meningkatkan partisipasi pendukung mereka, yang mungkin tidak cukup militan untuk datang ke bilik suara jika tidak diberi imbalan. Nichter menyebut strategi ini sebagai pembelian partisipasi (*turnout buying*). Menurut Nichter (2008), pembelian turnout jauh lebih mudah untuk dimonitor partai dan timses karena jika suporter pasif bersedia hadir ke tempat pemungutan suara, hampir dipastikan mereka akan memilih partai yang telah memobilisasi mereka. Sebaliknya, pemilih mengambang, meski mendapat amplop sekalipun, belum tentu memilih sesuai keinginan politisi karena sulit untuk memastikan partai apa yang dipilih mereka di bilik suara ketika rezim pemilu dilakukan secara rahasia.

Studi Diaz-Cayeros dan kawan-kawan (2012) juga menemukan fakta yang memperkuat madzab pemilih-inti. Namun argumen Diaz-Cayeros dan koleganya berbeda dengan Cox dan McCubbins (1986) dan Nichter (2008). Diaz-Cayeros dan rekan menyatakan bahwa partai politik cenderung menyasar pemilih partisan karena loyalitas basis pemilih partai tergantung ada tidaknya keuntungan material (*endogeneity of partisan loyalties*). Jika basis partai tidak disantuni dan dirawat dengan bantuan, konstituen partai bisa pindah ke lain hati. Dukungan terhadap aliran *core-voter* juga datang dari Stokes dan koleganya (2013). Stokes dan kawan-kawan mengatakan bahwa pemilih loyal cenderung disasar bukan karena faktor *risk-aversion* politisi, mobilisasi partisipasi pemilih pasif, atau loyalitas pemilih yang bersyarat, seperti disampaikan oleh para ahli di atas, tapi lebih merupakan indikasi praktik predatorik timses. Menurut Stokes dan rekannya, strategi *core-voter* ini tidak diniatkan secara sistematis untuk ‘membeli’ suara maupun untuk membeli partisipasi, tetapi sekadar merupakan manifestasi dari perilaku perburuan rente yang dilakukan timses. Alasannya ada dua. *Pertama*, strategi ini memungkinkan timses untuk mendapatkan margin keuntungan yang lebih besar karena ongkos operasi politik uang bisa dikutip demi keperluan pribadi. *Kedua*, taktik menyasar kantong suara sendiri juga berguna untuk mengonsolidasikan posisi dan prestise timses dalam jaringan patronase mereka sendiri.

Namun di kubu seberang, Lindbeck dan Weibull (1987) menentang tesis

pemilih-partisan. Argumennya, karena pemilih mengambang lebih menentukan hasil akhir pemilu, partai sebaiknya menargetkan pemilih mengambang ketimbang basis partai (Lindbeck dan Weibull 1987; Dixit dan Londregan 1996; Stokes 2005). Alasan utama di balik strategi pemilih-mengambang sederhana adalah bahwa pemilih inti atau loyalis tidak perlu diiming-iming insentif material untuk memilih, sedangkan dukungan pemilih mengambang terhadap suatu partai atau calon sangat dipengaruhi ada tidaknya uang atau hadiah. Oleh karena itu, dalam logika aliran pemilih-mengambang, memberikan bantuan kepada pemilih yang setia kepada partai adalah sebetulnya kemubadziran karena menyalakan sumber daya yang terbatas. Dengan alasan yang sama, aliran ini juga mengatakan bahwa politisi tidak akan mengarahkan logistik mereka kepada pendukung lawan yang terlalu ideologis karena kelompok pemilih ini tidak dapat diarahkan untuk mengubah pilihan meskipun mereka diguyur dengan uang.

Dalam studinya yang lebih awal, Stokes (2005) menyatakan bahwa partai-partai cenderung menghindari untuk ‘menanam investasi’ pada pemilih partisan karena walaupun toh mereka mengancam membelot dari partai jika tak diberi uang itu tak lebih dari gertak sambal. “Ancaman [pemilih loyal] semacam itu kurang bisa dipercaya [karena] partai tahu bahwa loyalis partai, bahkan tanpa imbalan sekalipun, lebih baik bekerjasama selamanya [dengan partainya] daripada membelot selamanya” (2005: 320). Dalam studinya pada 2005, Stokes percaya bahwa mesin partai umumnya lebih memilih menarget pemilih mengambang, atau bahkan pendukung lawan yang lemah yang masih bisa dipersuasi. Alasannya, kata Stokes (2005), ancaman *swing voters* untuk memilih partai sesuai pilihan hatinya jika mereka tidak digoda dengan insentif material itu lebih mengkhawatirkan ketimbang “gertak sambal” pemilih loyal.

Selain itu, aliran pemilih-mengambang bersandar pada logika maksimalisasi suara, yang berarti mengarahkan sasaran ke pemilih mengambang cenderung memiliki kemungkinan lebih besar untuk menang dalam pemilu. “Pemilih mengambang sering diasosiasikan dengan margin kemenangan,” kata Diaz-Cayeros et al. (2012: 3). Dengan kata lain, keberhasilan pemilihan bergantung pada pemilih yang mengambang. Jika partai ingin menang dalam pemilu, mereka harus tidak hanya mengandalkan anggota setia mereka, tetapi juga menarik pemilih yang tidak secara ideologis menyokong partai lawan. Menurut madzab ini, hasil pemilu akan sangat dipengaruhi oleh fokus strategi elektoral pada pemilih yang tidak memiliki preferensi elektoral.

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Bagaimana dengan kasus Indonesia di tengah perdebatan akademis yang sengit antara mereka yang mendukung model pemilih-inti vs pemilih-mengambang? Apakah Indonesia mewakili salah satu madzab, malah mengambil rute yang berbeda sama sekali dengan literatur yang ada? Sebelum mengulas lebih jauh mengenai pertarungan dua aliran keserjanaan ini, saya akan mengulas tiga teori besar yang diprediksi menjelaskan politik uang. Ringkasan statistik variabel dependen dan kovariat tercantum dalam *Tabel 3* di bawah ini.

TABEL 3
STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL DEPENDEN DAN KOVARIAT

VARIABEL	MEAN	STD. DEVIASI	MIN	MAX	N
Pembelian suara	0,22	0,27	0	1	1018
Gender (1 = laki-laki; 0 = perempuan)	0,5	0,5	0	1	1212
Pedesaan (1 = desa; 0 = kota)	0,5	0,5	0	1	1212
Usia	42,29	13,13	16	86	1211
Pendidikan	4,94	2,47	1	10	1210
Pendapatan	6,61	3,52	1	12	1205
Jawa (1 = Jawa; 0 = Non-Jawa)	0,41	0,49	0	1	1212
Agama (1 = Islam; 0 = Non-Islam)	0,89	0,31	0	1	1212
Wilayah (Jawa)	0,58	0,49	0	1	1212
Keterlibatan sosial	0,1	0,12	0	0,63	1191
Sikap partisan/party ID	1,29	0,73	1	4	1210
Efikasi	2,36	0,5	1	4	979
Minat Politik	4,13	1,34	2	8	1148
Informasi Politik	2,46	0,7	1	5	965
Partisipasi Politik	1,81	0,45	0	2	1199
Kepercayaan Politik	2,73	0,53	1	4	1074
Dukungan terhadap Demokrasi	2,86	0,54	1	4	987

Tabel 4 menampilkan hasil regresi linear². Model 1 dalam Tabel 4 menguji sejauhmana teori modernisasi dan variabel-variabel sosial demografis lainnya dapat menjelaskan kemungkinan seseorang menjadi target pembelian suara. Berbeda dengan pendapat banyak ahli, penelitian ini menemukan bahwa indikator yang biasanya digunakan untuk mendukung teori modernisasi secara umum tidak

dapat memprediksi kemungkinan responden terpapar operasi politik uang. Dengan kata lain, perbedaan tingkat pendapatan dan pendidikan pada tingkat individual serta domisili responden di desa tidak menentukan kemungkinan responden menjadi target operasi politik uang. Setelah dikontrol dengan keterlibatan sosial (Model 2) dan komponen sikap politik (Model 3), pengaruh variabel-variabel teori modernisasi tetap tidak signifikan.

Menariknya, setelah memasukkan semua variabel kontrol, seperti yang ditunjukkan pada kolom akhir Tabel 4, satu-satunya variabel sosio-demografis yang masih memiliki nilai statistik yang signifikan adalah responden Muslim (signifikansi 0,05). Dengan kata lain, pemilih Muslim meningkatkan kemungkinan disasar operasi klientelistik dibanding non-Muslim. Mungkin ada dua penjelasan. *Pertama*, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa kandidat dan penerima insentif material yang beragama Muslim menggunakan alasan agama untuk mendukung praktik klientelistik.

Dalam penelitian kualitatif selama tiga belas bulan, saya menemukan bahwa banyak caleg, baik dari partai Islam maupun nasionalis, mengemas paket pemberian mereka dalam bahasa-bahasa agama. Misalnya, mereka menyebut uang atau hadiah sebagai zakat, sedekah, atau *bisjarah*. Akibatnya, seorang penerima yang beragama Islam melihat pemberian amplop bukan sebagai “politik uang” yang secara moral bermasalah, tetapi malah dianggap sebagai “moral economy of gift-giving” (Aspinall et al. 2017: 4). *Kedua*, fakta bahwa jaringan patron-klien konvensional, di mana hadiah atau uang dari politisi didistribusikan, lebih populer di kalangan Muslim. Secara khusus, banyak kandidat menggunakan berbagai institusi sosial informal yang sudah ada sejak lama di basis umat Islam, seperti masjid, pesantren, atau majelis taklim.

² Dalam usaha bisa diterima sebagai asumsi model regresi linier berganda, pertama-tama perlu dilakukan pengujian asumsi klasik, yang setidaknya mencakup uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas, residual tidak terdistribusi secara normal (Lihat Lampiran 1). Saya kemudian melakukan regresi logistik karena pengujian ini tidak memerlukan banyak tes asumsi klasik (termasuk uji normalitas) yang disyaratkan dalam hubungan linier antara variabel dependen dan independen. Dalam model logistik, variabel dependen merupakan skala dikotomis yang mengambil nilai 1 jika responden menerima penawaran pembelian suara sekali/dua kali, beberapa kali, jarang, cukup sering, atau sangat sering. Temuan menunjukkan bahwa hasil kedua model logistik dan linier sangat mirip (lihat Lampiran 2), yang menunjukkan bahwa hasil regresi linier bisa digunakan dalam kasus ini sebagaimana juga hasil regresi logistik. Saya memutuskan untuk menampilkan model regresi linier daripada model logistik karena dua alasan. *Pertama*, karena analisis regresi linier dan regresi logistik menghasilkan temuan yang kurang lebih sama, maka pemakaian model linier dapat dibenarkan. *Kedua*, dibandingkan dengan regresi logistik, estimasi model linier lebih mudah untuk ditafsirkan (Hellevik, 2007).

TABEL 4
ANALISIS REGRESI LINIER
FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN POLITIK UANG

	MODEL 1			MODEL 2			MODEL 3		
	Socio-Demografi			Keterlibatan Kewargaan			Sikap Politik		
	<i>b</i>	<i>S.E</i>	<i>Beta</i>	<i>b</i>	<i>S.E</i>	<i>Beta</i>	<i>b</i>	<i>S.E</i>	<i>Beta</i>
Socio-Demografi									
Gender (Laki-laki)	0,036*	0,018	0,065	0,032	0,018	0,058	0,011	0,022	0,019
Desa	0,019	0,020	0,033	0,014	0,020	0,026	0,047	0,025	0,081
Usia	-0,002*	0,001	-0,083	-0,002**	0,001	-0,086	-0,001	0,001	-0,052
Pendidikan	0,008	0,004	0,072	0,006	0,004	0,054	0,005	0,005	0,042
Pendapatan	-0,001	0,003	-0,010	-0,001	0,003	-0,011	-0,007	0,004	-0,088
Agama (Muslim)	0,080**	0,030	0,087	0,082**	0,031	0,090	0,089*	0,038	0,095
Etnis (Jawa)	0,025	0,020	0,044	0,021	0,020	0,038	0,044	0,025	0,075
Wilayah (Jawa)	-0,019	0,021	-0,033	-0,024	0,021	-0,042	-0,038	0,026	-0,064
Keterlibatan Kewargaan									
Keterlibatan sosial				0,069	0,077	0,029	-0,075	0,093	-0,033
Sikap Politik									
Party ID/sikap partisan							0,049***	0,014	0,138
Efikasi politik							-0,054*	0,025	-0,093
Ketertarikan politik							0,036***	0,010	0,163
Informasi politik							0,019	0,019	0,048
Partisipasi politik							-0,002	0,026	-0,003
Kepercayaan politik							-0,001	0,023	-0,002
Dukungan demokrasi							-0,040	0,023	-0,074
Konstanta	0,154**	0,055		0,168**	0,056		0,204	0,144	
Adjusted R2	0,017			0,015			0,063		
Valid N	1014			995			671		

Keterangan: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$; *b* = koefisien tidak terstandarisasi; *Beta* = Koefisien terstandarisasi

Analisis regresi, seperti yang ditunjukkan dalam Model 2 dari Tabel 4, menegaskan statistik bivariat bahwa efek substantif keterlibatan sosial –yang diukur melalui keanggotaan dalam organisasi sosial— secara statistik tidak signifikan. Padahal banyak literatur klientelisme elektoral yang mengklaim bahwa jejaring keterlibatan dalam asosiasi kewargaan menjelaskan kemungkinan menjadi target operasi jual beli suara (Callahan, 2005; Brusco et al., 2004). Tetapi studi saya menunjukkan bahwa keterlibatan dalam organisasi sosial di Indonesia hanya berdampak kecil pada kecenderungan seorang individu terpapar politik uang. Keterlibatan individu dalam sebuah organisasi sosial tidak membuat perbedaan dalam pengalaman ditawari insentif material.

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Apa dampak sikap politik (*political attitudes*)? Seperti yang ditunjukkan dalam Model 3 di Tabel 4, tiga variabel sikap politik sangat signifikan menjelaskan politik uang. *Pertama*, berbeda dengan prediksi sebelumnya, analisis multivariat menunjukkan korelasi signifikan secara statistik dan positif antara politik uang dan sikap partisan. Analisis multivariat menunjukkan bahwa efek sikap partisan tidak palsu (*spurious*) dan tetap signifikan terlepas dari variabel keterlibatan sosial, sikap politik, dan variabel demografi dan sosial-ekonomi. Efek substantif sikap partisan sangat besar ($p < 0,001$). *Kedua*, berbeda dengan ekspektasi awal, analisis multivariat menunjukkan bahwa minat politik (*political interest*) secara statistik sangat signifikan ($p < 0,001$) dalam menjelaskan politik uang. Dalam rezim demokratis, warga yang baik adalah mereka yang tertarik dengan politik, memiliki pengetahuan yang luas, dan karenanya menolak praktik klientelistik (Van Deth 1983). Namun, analisis regresi dalam kasus Indonesia menunjukkan bahwa minat politik malah berkorelasi positif dengan praktik yang tidak demokratis seperti jual beli suara. Guardado dan Wantchekon (2014: 7) menyatakan bahwa pengalaman terpapar politik uang bersifat *endogeneous* terhadap ketertarikan pemilih terhadap politik. Mereka menyatakan bahwa pemilih yang sangat tertarik pada politik cenderung lebih terlibat dalam kegiatan politik, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka menerima uang atau hadiah dari politisi pialang suara semasa kampanye.

Terakhir, hasil regresi menunjukkan bahwa efisiensi politik adalah prediktor kuat untuk politik uang. Koefisien korelasi variabel efikasi menunjukkan hasil

negatif. Artinya, orang-orang yang tidak memiliki efikasi lebih mungkin terpapar politik uang. Demikian juga sebaliknya. Ini memang bukan temuan mengejutkan karena hubungan seperti itu telah ditunjukkan dalam literatur sebelumnya tentang klientelisme (misalnya, Kerkvliet 1991; Schaffer dan Schedler 2007). Variabel-variabel sikap politik yang lain tidak banyak mempengaruhi politik uang di Indonesia. Dukungan warga terhadap demokrasi tidak lantas membuat mereka mengharamkan praktik haram menjual suara demi imbalan material. Partisipasi dalam pemilu juga bukan merupakan prediktor politik uang yang andal.

Tanpa bermaksud mengabaikan temuan-temuan yang menarik di atas, saya ingin mengulas temuan analisis regresi yang menarik, yakni sikap partisan konsisten sebagai determinan operasi jual beli suara. Efek sikap partisan signifikan, terlepas dari faktor sosial-ekonomi, keterlibatan sosial dan sikap politik. Fakta bahwa sikap partisan secara signifikan mendorong para pialang suara menebar amplop kew pemilih tentu menyimpan teka-teki. Alasan apa yang mendorong kandidat dan partai di Indonesia untuk menarget pemilih partisan mereka sendiri? Ini jelas bertentangan dengan argumen pemilih-mengambang yang berpendapat bahwa pemilih partisan sudah pasti menjadi pangsa pasar tradisional sebuah partai, bahkan tanpa diiming-imingi insentif material. Kemudian jika benar pemilih partisan atau loyal menjadi sasaran operasi jual beli suara, seberapa besar peluang seorang politisi lolos ke parlemen hanya dengan menargetkan pemilih semacam itu? Berapa jumlah pemilih partisan yang sebenarnya ada di Indonesia?

06

Target Operasi Politik Uang: Pemilih Partisan atau Mengambang?

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

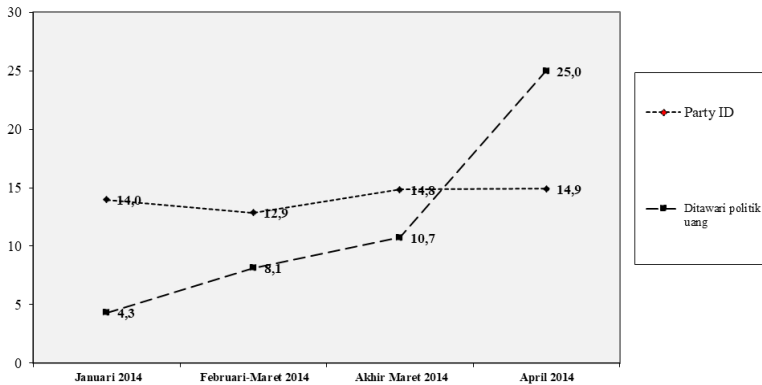
Untuk menjawab pertanyaan yang masih menggantung di atas, saya membahas lebih detail interaksi antara sikap partisan dan jual beli suara. Pertama, penting untuk menunjukkan berapa banyak pemilih partisan yang mengidentikkan dengan partai—juga dikenal sebagai *party ID*—di Indonesia. Survei pemilih yang dilakukan setelah pemilu April 2014 menunjukkan hanya 14,9% (atau dibulatkan menjadi 15%) pemilih secara nasional yang mengaku dekat dengan partai dalam, jauh di bawah standar global. Dengan sekitar 187 juta pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Legislatif 2014, 15% dari total tersebut berarti hanya 28 juta pemilih yang merasa dekat dengan suatu partai politik. Bahkan data terakhir menunjukkan tren penurunan pemilih partisan (Hicken et.al. 2022).

Temuan bahwa sikap partisan menjadi prediktor signifikan politik uang menimbulkan pertanyaan penting seputar potensi kausalitas terbalik (*reverse causality*). Sebagaimana Diaz-Cayeros dan rekan-rekannya (2012: 159) temukan di Meksiko, hubungan antara sikap partisan dan jual beli suara adalah sebetulnya ‘kesetiaan partisan bersyarat’ (*conditional partisan loyalty*). Dengan kata lain, sikap loyal terhadap partai muncul jika mereka menerima bantuan material. Jika mereka tidak menerima uang, pemilih tidak merasa dekat dengan partai. Stokes dan rekan-rekannya (2013: 54) juga mengindikasikan potensi sikap partisan yang bersifat endogen. Alih-alih preferensi politik atau *party ID* pemilih mengundang operator politik untuk menarget mereka dengan uang, justru insentif elektoral ini yang

menyebabkan pemilih tersebut merasa dekat, dan karenanya memilih partai yang memberi uang.

Grafik 3 menunjukkan bahwa sikap partisan di Indonesia tidak bergantung pada politik uang. Jika *party ID* sebagai indikator sikap partisan dipengaruhi oleh distribusi uang, maka sikap partisan akan meningkat seiring dengan peningkatan praktik jual beli suara ketika pemilu semakin dekat. Grafik 4 memiliki garis titik-titik persegi yang menunjukkan persentase responden yang merasa dekat dengan partai, dan garis putus-putus panjang yang menunjukkan persentase responden yang terpapar politik uang. Kita perlu melacak dua garis ini dari waktu ke waktu untuk mengetahui apakah transaksi jual beli suara memiliki efek resiprok terhadap sikap partisan. Grafik 3 menunjukkan bahwa proporsi pemilih yang mengaku disasar politik uang terus meningkat selama kampanye, meningkat dari titik rendah pada Januari 2014 menjadi 4,3% pada Januari, 8,1% pada akhir Februari hingga awal Maret, 10,7% pada akhir Maret, dan 25% dalam beberapa hari menjelang pemilihan pada April.

GRAFIK 3
PARTY ID DAN POLITIK UANG JELANG PEMILU 2014 (%)

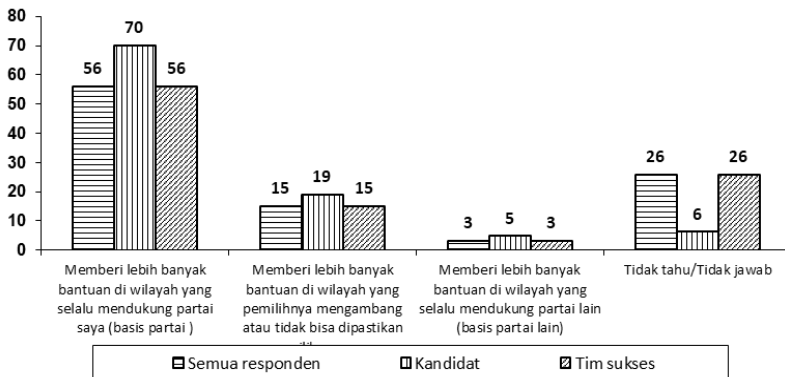


Jika hipotesis *endogenitas party ID* tersebut benar, tingkat kedekatan pemilih terhadap partai seharusnya juga meningkat seiring dengan peningkatan dramatis insiden jual beli suara dalam minggu-minggu terakhir menjelang pemilu. Loyalitas partisan relatif stabil selama Pemilu 2014, seperti yang ditunjukkan oleh garis putus-putus pada Grafik 3. Tingkat *party ID* pemilih selama Januari hingga April 2014

relatif tidak berubah, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya sikap partisan tidak terpengaruh oleh insentif elektoral yang bersifat jangka pendek. Ini adalah bukti tegas bahwa efek *party ID* tidak bersifat endogen, dan bahwa loyalitas pemilih terhadap partai di Indonesia bukanlah refleksi atas interaksi klientelistik antara pemilih dengan partai atau politisi. Hasil ini sejalan dengan pendahulu teori *party ID*, yang mendefinisikan identifikasi pemilih terhadap partai sebagai perasaan keterikatan psikologis yang bersifat personal (Campbell et al. 1960) dan menganggap sikap partisan lebih sebagai identitas kepartaian yang tetap daripada opini yang dapat berubah karena faktor eksternal (Larcinese et al. 2012: 3). Intinya, sikap partisan tidak tergantung pada hal-hal jangka pendek seperti praktik jual beli suara.

Temuan awal survei pemilih yang menunjukkan pemilih partisan cenderung terpapar politik uang diperkuat oleh temuan survei politisi dan timses yang saya lakukan pasca-Pemilu 2014 di empat provinsi (Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara) dengan total sampel sebanyak 1,199 responden yang terdiri dari 299 anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan 900 timses yang bekerja untuk anggota DPRD dalam Pemilu 2014. Survei menunjukkan bahwa politisi dan timses mengklaim mendistribusikan sebagian besar bantuan mereka di wilayah basis partai dibanding wilayah lain (*Grafik 4*). Temuan ini tentu saja tidak sesuai dengan harapan yang melekat dalam hipotesis pemilih-mengambang, dan sebaliknya tampak mengkonfirmasi aliran penargetan pemilih inti yang diusulkan oleh Nichter (2008) dan lainnya (Cox dan McCubbins 1986; Diaz-Cayeros et al. 2012; Stokes et al. 2013).

GRAFIK 4
PREFERENSI TERHADAP BASIS PARTAI (%)



Alasan utamanya untuk mengurangi risiko pembelian suara yang terbuang sia-sia— karena loyalis partai dianggap kurang berisiko, lebih responsif, dan dapat diprediksi dukungannya. Mereka sangat cemas maraknya pemilih oportunistik yang menerima amplop politisi, tapi enggan memilihnya. Di sebuah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, terpampang papan kecil di pinggir jalan yang bertuliskan *'tompo duite, coblos liyane'* (ambil uangnya, coblos caleg yang lain). Untuk itu, politisi mengarahkan bantuan kepada basis mereka sendiri. Caleg sukses dari PPP juga menggunakan portofolio strategi yang memaksimalkan dukungan elektoral dengan menebar bantuan kepada basis setia partai. Pada saat ditanya alasan memakai strategi tersebut, caleg tersebut mengutip filosofi lokal: *"Jangankan haruan³ ganal, haruan halus haja bisa meluncat"* (Jangankan ikan besar, bahkan ikan kecil pun bisa lolos darimu). Pemilih loyal itu, kata sang caleg, seperti ikan kecil yang dukungannya elektoralnya cukup sulit diamankan. Ikan kecil saja sulit ditangkap, apalagi 'ikan besar.' Ia mengibaratkan pemilih mengambang seperti ikan besar yang memang menggiurkan tapi tingkat kesulitan menangkapnya lebih tinggi karena membutuhkan banyak usaha (Wawancara, 21 Juli 2014).

Selain itu, banyak aktor klientelistik yang menarget loyalis partai sebagai bentuk *gift giving*, bahkan kewajiban moral. Mereka menyebutnya sebagai hadiah, tanda perhatian atau imbal timbal balik (resiprokalitas) kepada basis pemilih. Dalam kasus seperti itu, Walker (2014) mengatakan politik uang tidak didefinisikan sebagai transaksi pasar ekonomi, tapi merupakan fungsi hubungan sosial yang berkaitan-kelindan dalam moral ekonomi tradisional. Di seluruh Asia, banyak istilah yang menggambarkan fenomena hubungan timbal balik. Istilah *utang budi* yang dikenal di Indonesia misalnya, agak mirip dengan *utang na loob* di Filipina (Alejo et al. 1996: 84) atau *guanxi* 关系 di Cina (Wang 2013: 4-5). Banyak caleg yang menyebut uang yang mereka berikan sebagai 'uang saku' atau 'uang lelah'. Pembeneran standarnya adalah bahwa 'hadiah' tersebut diberikan untuk mengkompensasi waktu pendukung setia yang hilang karena mereka harus pergi ke TPS (Aspinall et al. 2017: 11). Edi Inrizal, seorang antropolog dari Universitas Andalas, Padang, mengutip pepatah, *'kanai pacak'* (percikkan sedikit uang), yang dipakai warga Minang untuk menggambarkan pemberian hadiah pada saat pemilu. Bagi orang awam, kekuasaan politik seringkali diasosiasikan dengan sumber daya uang yang

³ Haruan adalah spesies ikan *snakehead*, ikan air tawar asli Banjar dan kerap jadi makanan sehari-hari bagi penduduk setempat.

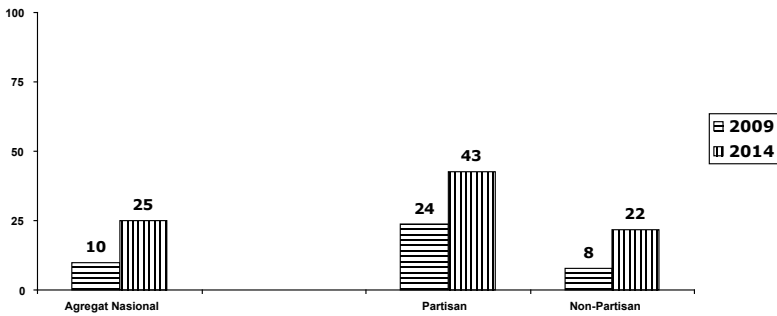
besar, sehingga mereka yang mencalonkan diri sudah seharusnya berbagi uang kecil kepada pemilih sebagai budaya tanda terima kasih (Edi Inrizal, Wawancara, 21 September 2014).

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Sebagaimana telah disebut sebelumnya, hanya 15% dari total pemilih yang memiliki sikap partisan di Indonesia. Sementara 85% responden bisa dikategorikan sebagai pemilih mengambang karena tidak dekat dengan partai manapun. Ini menyisakan “misteri” yang belum terjawab: jika benar jumlah pemilih yang partisan sedemikian sedikit, mengapa politisi dan timsesnya bersikukuh mengarahkan uangnya kepada pemilih semacam itu?

Dengan membandingkan tingkat prevalensi politik uang pada Pemilu 2014 dan 2009 dengan sikap partisan pemilih. Grafik 5 jelas menunjukkan bahwa secara *relatif* pemilih partisan cenderung menjadi target, tetapi dalam jumlah total (*absolute numbers*), pemilih mengambang yang menerima uang lebih banyak ketimbang jumlah pemilih loyal. Jika kita menggunakan analisis berbasis persentase murni, analisis atas data survei nasional dalam kasus di Indonesia yang disajikan sejauh ini menunjukkan dukungan kuat pada model pemilih-inti (*core-voter model*), dalam hal ini orientasi partisan meningkatkan kemungkinan seseorang menerima keuntungan material selama pemilu. Tetapi dengan menggunakan pendekatan absolut, kita akan sampai pada kesimpulan yang berbeda, yang lebih mirip dengan argumen pengikut aliran pemilih-mengambang. Grafik 5 menunjukkan bahwa “hanya” 22% pemilih non-partisan yang menerima uang selama kampanye 2014; namun, 22% ini berasal dari mayoritas pemilih, atau 85% dari total pemilih. Di sisi lain, 43% pemilih partisan yang menerima uang terlihat besar, tapi berasal dari bagian kecil populasi pemilih, atau 22% dari 85% pemilih mengambang. Dengan kata lain, 22% dari 85% pemilih mengambang yang menerima uang jauh lebih besar ketimbang 43% dari 15% pemilih yang partisan yang menerima uang.

GRAFIK 5
POLITIK UANG TINGKAT INDIVIDU BERDASARKAN PARTY ID (%)



07

Mengapa Distribusi Politik Uang Salah Sasaran?

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Survei pemilih menunjukkan hasil yang kompleks dan tidak hitam putih. Meskipun secara relatif pemilih loyal memang cenderung disasar politik uang, secara *absolut* praktik klientelisme justru banyak terjadi di kalangan pemilih mengambang. Maksud hati ingin membidik pemilih loyal, praktik jual beli suara justru banyak terjadi di kalangan pemilih yang komitmen elektoralnya rendah.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa baik model pemilih partisan (*core-voter model*) maupun pemilih mengambang (*swing-voter model*) tidak sepenuhnya berlaku di Indonesia. Banyak operator politik mengklaim bahwa mereka menarget pemilih partisan. Namun, karena hanya sedikit kelompok pemilih partisan di Indonesia, banyak amplop yang akhirnya jatuh ke tangan massa mengambang yang tidak memiliki komitmen elektoral kepada pemberi. Apakah ini buah dari pendekatan penargetan yang gagal? Apakah politisi dan timses di tingkat bawah salah mengidentifikasi pemilih loyal dan mengambang, sehingga mereka akhirnya salah target?

Studi saya menunjukkan bahwa banyak caleg dan timses sebenarnya ingin menysasar pemilih partisan, tapi faktanya mereka justru mendistribusikan logistiknya ke pemilih yang terkoneksi dengan jaringan-jaringan personal (*personal networks*). Akibatnya, caleg dan timses salah mengidentifikasi *swing-voter* sebagai loyalis karena mereka menganggap koneksi personal sebagai kecenderungan partisan. Studi menyebut kombinasi strategi ini sebagai "*personal loyalist strategy*" (strategi loyalis personal). Strategi loyalis personal ini mencoba untuk mempersonalisasikan kelompok partisan agar mereka tidak hanya loyal kepada partainya, tetapi juga kepada individu kandidat dalam konteks sistem proporsional terbuka di mana caleg yang meraih kursi partai adalah mereka yang mendapat suara terbanyak. Pendekatan ini dibangun di atas tiga fondasi strategi yang berbeda, tetapi saling terkait satu sama lain. *Pertama-tama*, para kandidat mulai dengan menargetkan wilayah di dalam dapil yang mereka anggap sebagai "basis partai" berdasarkan perolehan suara pada pemilu-pemilu sebelumnya. Mereka percaya "daerah basis" akan memudahkan mereka meraih kemenangan elektoral, terutama dalam potensi *personal votes* yang tersedia. Namun, berhubung daerah basis partai jumlahnya tidak banyak dan wilayah tersebut biasanya juga diperebutkan antar-caleg dalam satu partai, maka mulai jauh-jauh hari sebelum pemilu, mereka berupaya sekuat mungkin mempersonalisasikan basis partai mereka agar loyalis partai mencoblos bukan hanya nama partai, melainkan juga nama kandidat. Pemilih yang berdomisili di wilayah basis partai tersebut didekati dengan sentuhan personal (*personal touch*), termasuk para kader partai di daerah basis juga "dilayani" secara pribadi

Kedua, menyadari bahwa loyalis partai terbatas jumlahnya (15% dari total pemilih) dan rentan tergoda oleh sengitnya persaingan antar-caleg dalam satu partai, para kandidat kemudian berupaya memperluas pangsa pasar elektoral

dengan menggunakan koneksi-koneksi personal yang dapat mereka mobilisasi. Mereka mulai dengan mengidentifikasi “basis pemilih” berdasarkan tempat kelahiran, kekerabatan, agama, dan afiliasi etnis. Selain itu, mereka lebih suka mengembangkan wilayah yang memiliki koneksi jaringan patronase di mana mereka pernah memberikan bantuan seperti menyalurkan proyek pemerintah dan merenovasi jalan-jalan desa, masjid, atau irigasi (Aspinall et al. 2017: 13). Meskipun demikian, hal ini biasanya tidak cukup untuk membawa mereka ke kemenangan. Mereka tidak akan menang jika hanya bergantung pada jejaring personal kandidat. Ingat bahwa untuk menang di DPR pusat dan DPRD provinsi, caleg yang maju memerlukan ratusan ribu suara, tergantung pada populasi. Terakhir, untuk meningkatkan kemungkinan keterpilihan kandidat, mereka membentuk timses nonpartai yang diharapkan bisa menjangkau lebih banyak pemilih melalui koneksi personal. Tim ini bekerja di luar basis partai dan jaringan pribadi kandidat, yang membantu dengan memberikan dukungan tambahan yang bergantung pada jaringan pribadi dan klien tim yang berhasil. Yang penting bukanlah timses *per se*, tetapi seberapa besar armada tim yang efektif yang dimiliki seorang caleg untuk menjalankan operasi pembelian suara berdasarkan jaringan mereka yang beragam. Jumlah dan kekuatan jejaring pialang suara yang dimiliki oleh seorang kandidat dapat mempengaruhi jumlah suara yang diterima oleh seorang caleg dibandingkan dengan rival separtainya.

Meski tampak menjanjikan, strategi loyalis personal ini memiliki kelemahan mendasar, yakni politisi dan tim sukses bingung dalam menentukan kategori pemilih loyal. Dalam konteks Indonesia, definisi pemilih loyal berbeda dengan apa yang dipahami di Barat, di mana sikap partisan ditentukan kedekatan terhadap ideologi partai. Jika pemilih loyal atau partisan dimaknai mereka yang dekat dengan partai maka secara jumlah sangat sedikit (hanya 15% dari populasi). Jumlah yang sedikit itupun diperebutkan oleh caleg dalam satu partai politik dalam konteks sistem proporsional terbuka. Di Indonesia, pengertian pemilih partisan sangat ambigu dan dicampuradukkan dengan loyalitas personal. Loyalitas adalah konsep yang sangat lentur dalam konteks Indonesia dan memiliki dimensi yang luas yang mencakup bukan hanya kesetiaan terkait partai (partisan), tetapi juga loyalitas personal karena ada hubungan kekerabatan, agama, etnis dan patronase. Kebingungan dalam mendefinisikan pemilih ‘loyal’ ini membuat mereka salah sasaran: ampol justru ditebar ke pemilih mengambang yang terhubung dengan koneksi personal kandidat dan timses yang mereka yakini sebagai pemilih loyal.

Selain salah target (*mistargeting*), banyaknya pemilih mengambang yang menerima amplop juga disebabkan oleh problem agensi (*agency loss*). Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Ketika seorang caleg merekrut timses, potensi konflik kepentingan muncul. Caleg sebagai *principal* tentu berkeinginan agar suaranya naik signifikan dengan mempekerjakan timses sebagai *agent*. Namun tim sukses juga punya motif sendiri untuk mendapat insentif lebih, misalnya melakukan praktik *rent-seeking*.

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Saya menemukan setidaknya empat masalah dengan agensi berdasarkan survei caleg, timses, dan observasi mendalam yang saya lakukan pada tahun 2014. *Pertama*, sedikitnya 28% broker mengatakan bahwa mereka bekerja untuk lebih dari satu caleg, dan hampir 40% timses yang mengatakan bahwa mereka bekerja untuk lebih dari satu caleg juga dihubungi oleh caleg dari berbagai partai. Memang sebagian besar broker (61%) beralasan bahwa mereka membantu caleg yang maju dari tingkatan legislatif yang berbeda. Namun, 29% mengakui bahwa mereka membantu banyak caleg yang bersaing di daerah pemilihan dan tingkat legislatif yang sama. Sekitar 8% terakhir menyatakan bahwa mereka akan membantu caleg yang maju di dapil yang berbeda, tetapi dengan kapasitas yang sama. Tidak dapat disangkal bahwa survei tersebut menggunakan pertanyaan yang mengandung *social desirability bias*. Namun, paling tidak, survei ini menemukan bahwa perilaku timses sangat menyimpang.

Kedua, karena struktur piramida timses yang hierarkis, dana tidak sepenuhnya sampai ke pemilih di tingkat bawah. Sekitar 12% timses yang ditugaskan untuk memberikan uang kepada pemilih menyatakan bahwa mereka mengutip uang tersebut dari dana operasi politik untuk kepentingan pribadi. Fakta sebenarnya mungkin lebih besar dari ini, tetapi setidaknya survei sistematis ini mendukung klaim bahwa timses bertindak curang. Perlu diingat bahwa responden survei ini terdiri dari timses yang membantu kandidat yang lolos, sehingga kemungkinan praktik curang ini lebih sering terjadi di kalangan timses yang membantu kandidat yang gagal tidak terpotret dalam survei. *Ketiga*, survei juga mengonfirmasi bahwa timses cenderung membesar-besarkan jumlah pemilih yang mampu mereka pengaruhi jika diberi insentif material. Sebanyak 70% timses berpendapat bahwa warga sekitar dapat dipengaruhi oleh kompensasi finansial. Semakin banyak

timses yang dapat meyakinkan caleg bahwa pemilih yang tidak bertanggung jawab ini sangat banyak, semakin banyak dana yang diberikan caleg untuk jual beli suara dan semakin besar peluang timses untuk menilep uang.

Problem agensi yang terakhir adalah klaim caleg bahwa timses mereka secara sistematis mengumpulkan daftar pemilih yang potensial memilih mereka—dalam bahasa Inggris, *by name by address*. Caleg biasanya mengalokasikan uang untuk operasi jual beli suara berdasarkan daftar ini. Klaim ini tampaknya tidak diperkuat sepenuhnya. Hanya 47% timses dari anggota DPRD provinsi dan 52% timses dari anggota DPRD kabupaten/kota yang mengklaim telah menghasilkan daftar pemilih seperti itu. Seorang caleg dari PAN mengakui bahwa banyak caleg telah ditipu timses nakal. “Ada beberapa nama yang tertera di daftar itu setelah dicek ternyata sudah meninggal” (Wawancara, 22 April 2014). Dalam kasus timses yang menduakan tuannya dan bekerja sama dengan caleg lain, banyak orang yang menyerahkan daftar pemilih yang sama. Bahkan, tidak semua nama-nama pemilih yang tercantum dalam daftar berdasarkan nama dan alamat ini memiliki komitmen kuat untuk memilih caleg yang didukung oleh timses. Survei timses yang saya lakukan menemukan bahwa 22% dari responden timses mengaku menyerahkan daftar *by name by address* sekadar comot nama tanpa meminta izin pemilih yang namanya disebut. Meski demikian, banyak caleg yang sudah dapat memperkirakan adanya perbedaan antara jumlah nama yang terdaftar dalam daftar pemilih yang akan menjadi target operasi tersebut dengan jumlah suara sebenarnya yang mereka terima dalam pemilu. Istilah yang mereka pakai untuk menyebut kesenjangan antara klaim timses dan hasil aktual adalah “margin error”.

08

Efek Politik Uang, Persaingan Internal, dan Teori Selisih Kemenangan

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Saya sudah menjelaskan dua sumber utama mengapa politik uang tidak bisa maksimal, yakni perilaku malapraktik timses dan pemilih oportunistik yang cenderung mengambil insentif material yang ditawarkan, tapi pilihan mereka tak bisa dipegang. Ini diperparah dengan minimnya mekanisme pengawasan caleg terhadap armada timses mereka sehingga problem agensi sulit diatasi. Rezim pemilu luber juga menyulitkan timses dalam menerapkan disiplin terhadap pemilih oportunis tadi. Justru di sinilah muncul misteri berikutnya yang patut dikuak. Jika benar politik uang salah target dan rentan menjadi sasaran empuk perilaku predatorik timses, mengapa banyak caleg yang melakukan operasi politik uang secara besar-besaran? Ingat bahwa insiden jual beli suara terjadi secara masif di Indonesia. Jika praktik klientelistik tersebut benar-benar tidak efisien, bagaimana ia bisa berdampak pada hasil pemilu?

Dalam literatur komparatif tentang politik uang, efek elektoral pembelian suara diukur melalui dua dimensi utama: (1) sejauhmana politik uang efektif mendatangkan partisipasi pemilih lebih besar; dan (2) sejauhmana politik uang menentukan pilihan elektoral. Terlepas target yang meleset dan timses yang tidak dapat diandalkan, studi ini menunjukkan bahwa pembelian suara punya dampak yang secara statistik signifikan mendatangkan partisipasi pemilih. Survei pasca-pemilu yang saya lakukan menemukan bahwa responden yang mengaku terpapar politik uang lebih cenderung datang ke tempat pemungutan suara (TPS) ketimbang

mereka yang tidak ditawari amplop. Tingkat partisipasi pemilih yang ditawari uang sebanyak 81%, sedangkan pemilih yang tidak terpapar politik uang tapi hadir ke TPS sebesar 74%. Selisih ini secara statistik signifikan pada tingkat derajat kepercayaan 95% ($p = 0,017$).

Studi ini juga menunjukkan bahwa politik uang bisa mempengaruhi pilihan penerima hingga mencapai 10,2 %. Estimasi ini diperoleh dari responden yang mengaku ditawari politik uang yang kemudian digali lebih jauh apakah uang atau barang yang mereka terima berpengaruh terhadap pilihan mereka atau tidak. Meskipun 10,2% total pemilih yang terpengaruh politik uang terlihat kecil, justru di sinilah terletak daya tarik politik uang. Dalam konteks sistem proporsional terbuka, persaingan internal partai politik menghasilkan derajat ketidakpastian yang tinggi terkait prospek elektoral caleg dalam memenangi kursi yang diperoleh partainya. Meskipun efek jual beli suara terkesan tidak terlalu besar, perbedaan suara antar caleg sedikit saja akan menentukan siapa yang kalah atau menang. Untuk itu, politik uang menjadi jalan keluar dari kompetisi elektoral yang ketat antar caleg karena suara yang diperoleh dari praktik haram tersebut sangat menentukan hasil akhir pemilu. Jangan lupa dalam sistem proporsional terbuka, setiap partai yang mendapat kursi harus diberikan kepada caleg dengan suara terbanyak, berapapun selisihnya dengan suara seseorang caleg dalam satu partai politik. Akibatnya bisa ditebak: terjadilah pertarungan *zero-sum games* antar-caleg dalam satu partai politik. Contoh yang paling dramatis adalah Gimmy Rusdin yang mengalahkan rival separtainya dari PDI-P, Listiani Wulandari di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta V hanya dengan selisih satu suara pada 2014.

Caleg memiliki insentif untuk mengalahkan pesaingnya dalam sistem proporsional terbuka daripada menghabiskan waktu untuk melawan anggota partai politik lain. Caleg umumnya dapat memperkirakan jumlah kursi yang akan dimenangkan partainya berdasarkan hasil pemilu sebelumnya atau faktor lain. Namun, terutama di dapil tanpa caleg favorit, mereka biasanya tidak tahu siapa di antara anggota partai politik yang akan memenangkan kursi tersebut. Akibatnya, setiap caleg akan mempertimbangkan seberapa ketat persaingan di dalam partainya dan di luar partainya untuk mendapatkan jumlah suara personal yang mereka butuhkan. Politik uang menjadi cara untuk menang dalam kontestasi elektoral di tengah ketidakpastian besar tentang siapa di antara para caleg yang akan lolos dari satu partai.

Untuk mengukur seberapa ketat kompetisi elektoral di 2014 kaitannya dengan insentif melakukan politik uang, saya memperkenalkan teori *winning margin* (selisih

kemenangan) pada tingkat DPR Pusat. Dengan menggunakan statistik resmi hasil pemilu, saya menampilkan selisih kemenangan yang dihitung berdasarkan total suara caleg terendah yang terpilih dikurangi suara caleg tertinggi yang kalah dalam partai politik yang sama dibagi oleh jumlah total suara yang sah yang mencoblos partai politik di sebuah daerah pemilihan. Secara umum, jumlah selisih kemenangan di setiap partai politik bervariasi. Namun cukup banyak caleg yang terpilih dengan selisih tipis. Misalnya, caleg PDI-P Wiryanti Sukamdani dari Dapil Jakarta I unggul tipis atas rival terdekatnya dengan selisih hanya 441 suara atau setara 0,1% saja. Demikian juga dengan Partai Golkar sebagai pemenang kedua Pileg 2014. Dari 91 kursi yang dimenangkan partai ini, 26 kursi di antaranya dimenangkan oleh calegnya dengan selisih tipis cukup untuk menyingkirkan rival terdekatnya dalam satu partai. Di Dapil Jawa Barat XI, Ahmad Zacky Siradj menang dengan selisih 0,2%. Di Dapil Jawa Tengah IV, Endang Maria Astuti, secara tak terduga unggul dengan selisih hanya 0,3% dan menggusur nama-nama beken termasuk seorang caleg petahana, Hajriyanto Thohari, mantan Wakil Ketua MPR. Demikian juga caleg pemenang dari partai-partai politik lainnya juga umumnya punya cerita yang sama: menang dengan selisih kemenangan yang tipis mengalahkan kompartiot separtainya. Paling dramatis adalah pengalaman Salim Mengga dari Partai Demokrat yang mampu mempertahankan kursinya di Dapil Sulawesi Barat dengan selisih hanya 25 suara saja setelah mengalahkan rival terdekatnya, Sulfia Suhardi.

Rata-rata selisih kemenangan di setiap partai politik dalam sebuah dapil adalah 31.801 suara. Tabel 5 menunjukkan jumlah total suara absolut yang dibutuhkan bagi setiap caleg dalam satu partai politik untuk lolos sedikit bervariasi antara 22.125 suara (Partai Demokrat) sampai 39.263 (PAN). Secara umum, jumlah selisih kemenangan absolut di setiap partai politik ini relatif kecil jika kita bagi total suara sah yang mencoblos partai-partai politik di seluruh dapil. Kolom 3 di Tabel 5 menunjukkan rata-rata jumlah suara sah di setiap dapil adalah 1.584.463 suara. Dengan demikian, tingkat kompetisi internal seluruh partai politik sangatlah tinggi dengan selisih kemenangan tipis berkisar antara 1,40% dan 2,48%. Namun, rata-rata margin kemenangan yang membedakan seorang caleg yang lolos dengan yang tidak hanya 1,65%. Inilah yang menjelaskan mengapa politik uang menjadi masif karena setiap caleg hanya memerlukan selisih 1,65% untuk bisa lolos ke Senayan. Jadi, jika praktik jual beli suara bisa mempengaruhi pilihan hingga 10,2% dari total pemilih, maka tidak heran banyak caleg yang masih bisa berharap meraih kemenangan dengan menggunakan strategi politik uang.

TABEL 5
RATA-RATA SELISIH KEMENANGAN PARTAI POLITIK

Partai Politik	Rata-rata Selisih Kemenangan di Tiap Partai	Rata-rata Jumlah Suara Sah Per Dapil	Persentase
NASDEM	35516.7	1584462.9	2.24
PKB	30180.2	1584462.9	1.90
PKS	28500.4	1584462.9	1.80
PDI-P	23080.2	1584462.9	1.46
GOLKAR	23387.1	1584462.9	1.48
GERINDRA	25530.5	1584462.9	1.61
DEMOCRAT	22124.9	1584462.9	1.40
PAN	39263.1	1584462.9	2.48
PPP	35049.7	1584462.9	2.21
HANURA	23247.6	1584462.9	1.47

09

“Dilema Tahanan” dan Tekanan Politik Uang

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

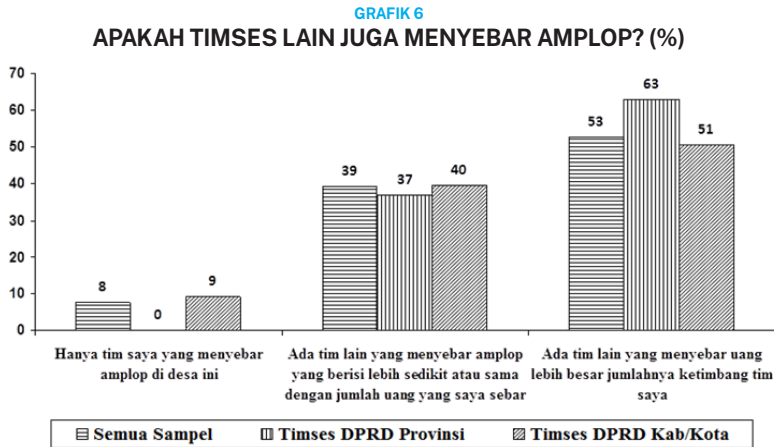
Namun perlu diingat bahwa mengejar margin kemenangan yang tipis bukanlah satu-satunya penjelasan mengapa pembelian suara begitu meluas. Banyak pemilu yang sama-sama kompetitif di beberapa negara yang ditandai oleh selisih suara yang kecil, tapi politisi tidak lantas menggelar taktik politik uang. Ada interpretasi lain yang juga masuk akal mengapa politisi masih lebih suka membeli

suara, meskipun 'investasi' elektoral tersebut menghasilkan imbal-balik yang rendah, dan sekalipun jika mereka tidak berada dalam persaingan yang sangat ketat. Yakni semacam kegagalan koordinasi dalam situasi seperti 'dilema tahanan' (*prisoner's dilemma*). Caleg akan diuntungkan jika semua bersepakat tidak melakukan operasi pembelian suara. Dalam situasi 'dilema tahanan', jika ada caleg yang melanggar kesepakatan dengan melakukan politik uang, maka risiko bagi caleg lain yang tidak melakukan pembelian suara adalah kalah dalam permainan itu. Jadi sekalipun operasi pembelian suara mungkin tidak terlalu efisien, dan tidak selalu menghasilkan kemenangan, caleg yang tidak membeli suara *dijamin* akan mengalami kekalahan.

Perangkap dilema tahanan ini makin terasa ketika pemilu tinggal menghitung hari. Semakin dekat dengan hari pencoblosan, ketidakpastian dan kecemasan para caleg makin membumbung tinggi. Akibatnya, tekanan dan dorongan melakukan operasi politik uang makin kuat. Apalagi jika mereka mengendus lawan yang juga melakukan cara yang sama. Ada asumsi umum yang dipercaya kuat bahwa caleg yang paling akhir menyebarkan uanglah yang paling diingat pemilih ketika berada di bilik suara. Seorang caleg mengaku mengguyur uang hingga pukul 09.00 pagi di hari pemungutan suara gara-gara rivalnya menyiram uang ke pemilih sesaat sebelum TPS dibuka. Ia berkilah: "Ini bukan lagi 'serangan fajar', tapi 'serangan dhuha' (merujuk pada waktu Dhuha saat matahari sudah terbit dan mulai meninggi)" (Wawancara, 20 April 2014).

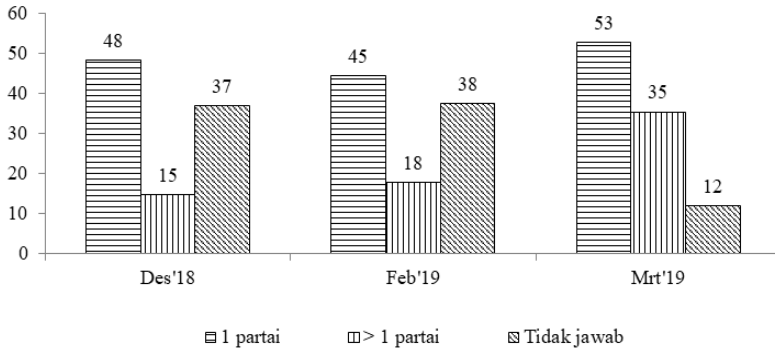
Data sistematis dilema tahanan yang dialami caleg diperoleh dari survei timses yang saya lakukan di 4 provinsi. Menurut observasi para timses sendiri, hanya 8% timses yang mengklaim bahwa timses mereka adalah satu-satunya pihak yang melakukan operasi politik uang. Sedangkan 92% broker mengakui bahwa mereka terlibat adu jual beli suara dengan timses lawan. Perinciannya, 53% responden mengatakan timses lawan menyebarkan amplop dengan jumlah uang lebih banyak ketimbang yang mereka berikan ke pemilih. Sedangkan 39% timses yang disurvei mengaku tim lawan menyebar uang sedikit atau kurang lebih sama dengan mereka. Situasi seperti ini rentan menjebak caleg dan timsesnya dalam keadaan dilema tahanan. Caleg merasa akan kalah bertarung jika dia tak menyuap pemilih, sedangkan lawan-lawannya aktif melakukan praktik jual beli suara. Manuver lawan, terutama di ujung pertarungan, menimbulkan kepanikan sehingga mendorong caleg melakukan langkah serupa. Mereka tak lagi memperhitungkan apakah politik uang berdampak besar atau kecil dalam meraup dukungan. Yang ada di benak mereka adalah politik uang dilihat sebagai instrumen untuk menetralsir

“serangan” lawan. Oleh karena, banyak responden survei caleg dan timses yang mengatakan politik uang sebagai mekanisme “menjaga basis,” “agar pemilih yang sudah mereka pelihara tidak lari,” dan lain-lain.



Semakin dekat dengan jadwal pemilihan, semakin besar tekanan psikologis untuk membeli suara. Data survei *post-election* Mei 2019 dan survei-survei pra-pemilu menunjukkan semakin dekat pemilu, semakin besar peluang pemilih menerima amplop ganda. Karena dalam survei responden dibolehkan menjawab lebih dari satu jawaban, maka berapa banyak mereka yang mendapat tawaran lebih dari satu partai bisa dikalkulasi. Pada survei nasional Desember 2018, dari total responden yang mengaku menerima uang, hanya 15% yang mengaku menerima amplop ganda. Proporsi penerima amplop ganda meningkat di Februari 2018 menjadi 18% di antara responden yang ditawarkan uang. Sebulan sebelum pemilu, yakni Maret 2019, proporsi mereka yang menerima *multiple payment* meroket menjadi 35%. Jika pertanyaan yang diajukan bukan hanya *multiple payment* dari partai lain, tapi juga yang berasal dari caleg dalam satu partai, sangat mungkin persentase penerima amplop ganda makin meningkat. Jangan lupa dalam sistem proporsional terbuka, persaingan antarcaleg bukan hanya antarpolisi, tapi juga caleg dalam satu partai. Intinya, kepanikan melanda sebagian besar caleg menjelang pemilihan. Mereka merasa para caleg lainnya makin gencar menyebar uang sehingga harus diantisipasi dengan cara serupa.

GRAFIK 7
RESPONDEN YANG MENGAKU MENERIMA AMPLOP GANDA
JELANG PEMILU 2019 (%)



Temuan di atas menunjukkan bahwa teori dilema tahanan sangat kuat dalam menjelaskan banyaknya politik uang di Indonesia. Meski caleg menyadari bahwa strategi politik uang tidak selalu membuahkan hasil, mereka tidak memiliki banyak pilihan ketika caleg lain melakukan hal yang sama. Di sini, politik uang dianggap sebagai strategi efektif untuk menghentikan upaya kandidat lawan untuk melakukan praktik pembelian suara. Dalam konteks dilema tahanan ini, caleg menggunakan politik uang bukan hanya untuk “membeli” suara, tetapi lebih untuk menghentikan tindakan agresif kandidat lawan yang menggunakan politik uang. Meskipun politik uang tidak menjamin kemenangan, caleg akan merasa kalah jika tidak menerapkan strategi tersebut. Sistem pemilu yang mendorong para peran kandidat (*candidate-centred voting*) makin menjebloskan caleg dalam situasi *zero-sum game* yang membuat mereka akan melakukan segala cara dalam rangka mengalahkan rival separtainya.

10

Desain Institusi, Sistem Pemilu, dan Pola Distribusi Patronase

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Saya telah menjelaskan panjang lebar betapa demokrasi elektoral kita ternodai oleh berbagai kecurangan dan malapraktik elektoral. Salah satu jenis manipulasi elektoral yang sering ditemukan di negara-negara demokrasi baru adalah praktik jual beli suara, seperti kasus Indonesia pasca-reformasi. Gelombang besar perubahan desain kelembagaan politik di Indonesia pasca-reformasi justru menciptakan celah yang lebar bagi strategi klientelistik. Argumen saya adalah perubahan sistem politik dan sistem pemilu, terlepas awalnya dimaksudkan untuk menciptakan pemilu yang bebas dan adil serta memperbaiki saluran akuntabilitas, ternyata memiliki efek samping yang malah menyuburkan praktik jual beli suara. Studi ini menunjukkan desain kelembagaan pasca-reformasi di Indonesia bisa menjelaskan bentuk dan mekanisme politik uang sekaligus pola, faktor determinan, strategi penargetan, dan efektivitas jual beli suara. Faktor-faktor kelembagaan dan kontekstual Indonesia yang berbeda dengan konteks institusional di Amerika Latin yang melahirkan debat akademis antara aliran pemilih-mengambang (*swing-voter model*) versus pemilih-loyalis (*core-voter model*) inilah yang membuat dinamika politik uang di Indonesia tidak sekadar mengekor dua mazhab intelektual yang dominan tersebut.

Politik uang tidak terjadi di ruang hampa. Karena itu, penting untuk menjelaskan secara singkat konteks institusional yang mempengaruhi dinamika politik uang, terutama terkait dengan sistem kepartaian dan sistem pemilu yang mendorong aksi jual beli suara di Indonesia. Sejak jatuhnya Soeharto pada 1998, sistem

kepartaian di Indonesia memasuki babak baru. Partai-partai baru bermunculan bagaikan cendawan di musim hujan. Akibatnya, muncul sistem multipartai yang sangat kompetitif, namun minim diferensiasi ideologis antar-partai. Pemilih kerap tidak dapat membedakan “jenis kelamin” partai berdasarkan posisi kebijakan atau platformnya. Setelah dua dekade reformasi, akar partai di masyarakat mengalami pelemahan yang ditandai oleh kecenderungan merosotnya *party ID*. Afiliasi terhadap partai menurun signifikan dari sekitar 86% pemilih yang merasa dekat dengan partai tertentu pada 1999 menjadi hanya 12% pada 2022. Penurunan *party ID* bukan hanya menandai kompetisi elektoral yang makin berpusat pada kandidat, tapi memberikan insentif bagi politisi untuk terlibat dalam ajang jual beli suara.

Selain itu, sistem pemilu di Indonesia juga mempengaruhi dinamika politik uang, terutama strategi elektoral yang diambil politisi. Menurut penelitian sebelumnya, desain sistem pemilu dapat berdampak signifikan pada strategi kandidat. Seperti yang Hicken jelaskan (2007a: 49), “*all else being equal*, jika sistem pemilu [yang digunakan] membatasi pemilih pada satu pilihan partai di antara banyak partai, seperti dalam sistem proporsional tertutup, kandidat lebih cenderung mengandalkan strategi yang berpusat pada partai”. Itulah memang yang terjadi pada 1999 ketika Indonesia mengadopsi sistem proporsional tertutup: Persaingan antarpolisi terjadi. Di bilik suara, pemilih hanya mencontong tanda gambar partai. Jika partai mendapat kursi di suatu dapil, kursi itu akan diambil oleh kandidat dengan nomor urut teratas. Nomor urut caleg ditentukan oleh elit partai. Namun, jelang Pemilu 2009 Mahkamah Konstitusi memperkenalkan sistem proporsional terbuka penuh, sehingga kursi yang dimenangkan oleh suatu partai di suatu dapil harus diberikan kepada caleg dari partai bersangkutan yang memperoleh suara paling banyak. Sistem baru ini berdampak kuat terhadap perubahan strategi elektoral kandidat. Dalam sistem pemilu semacam itu, para caleg berlomba mengejar menghasilkan *personal vote* dan melakukan strategi kampanye yang berbasis ketokohan ketimbang kampanye berbasis partai (*party-centred*). Agar lebih menonjol dibandingkan dengan pesaing internal dari dalam partai sendiri, caleg melakukan diferensiasi individual dan akhirnya mereka terperangkap dalam lingkaran setan politik uang.

Ini yang menjelaskan mengapa terjadi peningkatan insiden politik uang setelah sistem proporsional terbuka diadopsi dalam pemilu kita, dan membuat Indonesia harus menempati peringkat ketiga politik uang di dunia seperti telah dijelaskan sebelumnya. Dalam sistem di mana calon yang mendapat suara terbanyak berhak

mewakili kursi yang diperoleh partainya, maka mereka hanya perlu mendapatkan “segelintir” tambahan suara untuk mengalahkan pesaing internal. Jadi, terlepas dari inefisiensi dan efek elektoral politik uang yang terkesan kecil seperti dijelaskan di atas, dalam konteks kompetisi internal yang sangat ketat seperti di Indonesia, politik uang bisa membuat perbedaan antara yang menang dan kalah. Meskipun strategi pembelian suara ‘hanya’ mempengaruhi pilihan sebanyak 10% pemilih, angka ini lebih dari cukup bagi banyak kandidat untuk mencetak kemenangan dalam pemilu.

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Strategi penargetan operasi politik uang di Indonesia yang mengambil rute berbeda dibanding dua madzab keserjanaan yang mendominasi literatur klientelisme (*core-voter vs swing-voter*) juga disebabkan oleh konteks institusional yang bertolak belakang antara Indonesia dan Amerika Latin yang melahirkan debat akademis antara dua aliran tersebut. Paling tidak ada lima faktor kontekstual yang membedakan antara Indonesia dengan Amerika Latin, yakni (1) organisasi atau struktur distribusi politik uang; (2) sistem pemilu; (3) basis partai; (4) tingkat *party ID*; dan (5) wajib atau tidaknya ikut pemilu. Dalam hal struktur pelaksana politik uang, banyak literatur yang berasal dari studi-studi kasus di Amerika Latin, yang berasumsi bahwa partailah yang melakukan pembelian suara (Aspinall et al., 2015). Di Amerika Latin, pemilu tidak hanya diwarnai oleh tingkat partisan yang tinggi, tetapi mesin partai juga menjadi motor penggerak kampanye. Analisis semacam ini jelas problematik dalam konteks Indonesia. Meskipun peran partai masih berperan, secara faktual sejak sistem proporsional diperkenalkan bukan partai yang bertarung dalam medan laga elektoral. Justru para calon dibantu jaringan timses informal yang memainkan peran kunci dalam mengorganisir kampanye di tingkat akar rumput, termasuk dalam soal operasi politik uang. Para kandidat tidak hanya berkampanye *untuk* partainya, tetapi juga bertarung *melawan* caleg-caleg dari partai yang sama. Seperti telah saya tunjukkan di atas, dominasi peran caleg ini memiliki implikasi signifikan yang mempengaruhi pola pembelian suara dan mekanisme penargetan yang digunakan.

TABEL 6
PERBEDAAN KONTEKS INDONESIA
DENGAN NEGARA-NEGARA AMERIKA LATIN

NEGARA	ORGANISASI PARTAI	SISTEM PEMILU	SISTEM DUA PARTAI DOMINAN?	PEMILU DIWAJIBKAN?
Indonesia	Lemah	Proporsional terbuka	Tidak	Tidak
Argentina	Kuat	Proporsional tertutup	Ya	Ya
Venezuela	Kuat	Pluralitas + Proporsional tertutup	Ya	Tidak
Meksiko	Kuat	Pluralitas + Proporsional tertutup	Tidak	Ya
Brazil	Lemah	Proporsional terbuka	Tidak	Ya

Perbedaan lain dengan banyak kasus di Amerika Latin yang sering menjadi dasar literatur politik uang adalah sistem pemilu. Di banyak negara di kawasan Amerika Latin, anggota parlemen dipilih melalui sistem proporsional tertutup dan sisanya dipilih melalui *plurality rules* (Tabel 6). Dalam sistem proporsional tertutup, kandidat lebih banyak bergantung pada reputasi dan merek partai untuk berkampanye, dan persaingan elektoral terutama terjadi antar-partai daripada antar-caleg. Karena itu, masuk akal jika mesin partai di Amerika Latin cenderung menarget pemilih partisan. Namun, gambaran Indonesia sangat berbeda. Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka. Salah satu konsekuensi dari perbedaan sistem ini terhadap dinamika politik uang adalah bahwa para kandidat di Indonesia lebih bergantung pada jaringan personal daripada struktur partai. Dalam sistem proporsional terbuka, caleg dipaksa untuk mengejar suara pribadi, dan karenanya partai menjadi tidak relevan.

Selain itu, berbeda dengan banyak negara di Amerika Latin, di mana partai dan kandidatnya harus memenangkan mayoritas suara atau pluralitas besar, dalam sistem proporsional terbuka seperti yang diterapkan di Indonesia dengan *multi-member constituencies*, di mana banyak kursi diperebutkan per dapil, “segelintir suara” atau sebagian kecil dari pemilih bisa berdampak besar atas keterpilihan kandidat. Efek marginal dari setiap suara yang dikumpulkan melalui strategi politik uang sangat penting untuk menentukan kemenangan caleg dalam kompetisi yang kompetitif. Nurul Arifin dari Partai Golkar mengibaratkan pemilu dengan “seperti perang saudara di Suriah. Sesama saudara saling bertarung. Pedang yang dipakai dalam pertempuran tersebut adalah uang untuk membunuh saudara

mereka sendiri” (*Merdeka.com*, 28 April 2014). Nurul mengambinghitamkan sistem proporsional terbuka yang membuat para kandidat dari partai yang sama saling baku bunuh.

Perbedaan sikap partisan di kalangan pemilih Indonesia dengan banyak negara Amerika Latin juga menentukan strategi distribusi politik uang yang dipilih. Sebagaimana dijelaskan di atas, tingkat partisan di Indonesia jauh lebih sedikit dibanding Venezuela, Meksiko, dan Argentina serta negara Amerika Selatan lainnya, di mana literatur komparatif tentang politik uang dihasilkan. Di negara-negara Amerika Latin tersebut tingkat partisan relatif tinggi. Dalam kasus di mana pemilih yang secara umum memiliki kedekatan partisan, partai-partai cenderung menargetkan pendukung partisan dengan imbalan uang. Parameter utama yang digunakan partai untuk mengidentifikasi penerima imbalan material adalah *kedekatan ideologis* atau sikap partisan pemilih dengan partai (Dunning dan Stokes, 2008: 3). Hal ini sangat kontras dengan Indonesia, yang tingkat identifikasi pemilih terhadap partainya relatif rendah dan struktur partai tidak terlembaga dengan baik.

Terakhir, literatur akademis politik uang banyak terjadi dalam konteks pemilu bersifat wajib (*compulsory voting*) seperti di Brasil, Argentina, dan Meksiko. Secara intuitif, *compulsory voting* membuat partai cenderung mengarahkan sasaran politik uang pada pemilih mengambang, sementara strategi loyalis partai lebih mungkin terjadi di negara yang menjadikan pemilu sebagai hak. Di negara yang mewajibkan pemilu, partai-partai tidak terlalu khawatir pendukung loyalnya jadi golput, karena mereka akan dikenai penalti jika tidak berpartisipasi dalam pemilu. Dengan demikian, logika yang mendasari model pemilih-inti terpatahkan, karena basis loyalis partai dipaksa oleh aturan untuk menggunakan hak suaranya. Tanpa iming-iming uang atau hadiah, mereka akan mendatangi tempat pemungutan suara. Namun, bukti empiris menunjukkan hasil yang beragam dan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ketika aturan *compulsory voting* tidak ditegakkan secara tegas, seperti kasus di Argentina, partai-partai cenderung menysar loyalis partai dengan uang agar mereka bersedia hadir ke bilik suara. Sebaliknya, ketika aturan bahwa kewajiban ikut pemilu ditegakkan secara ketat, mesin-mesin partai terdorong menargetkan pemilih mengambang seperti kasus di Brasil (Gans-Morse et al. 2014). Di Indonesia, ikut pemilu tidaklah suatu kewajiban. Dalam keadaan seperti ini, basis konstituen partai mungkin saja tidak muncul di tempat pemungutan suara jika tidak diberi insentif material. Akibatnya, situasi semacam

ini membuat para operator politik berpikir untuk memprioritaskan strategi klientelistiknya pada mereka yang dianggap loyal agar bersedia berpartisipasi dalam pemilu. Namun, seperti diulas di bagian sebelumnya, penekanan pada sistem suara terbanyak berdasarkan *personal votes* dalam sistem proporsional terbuka yang diadopsi oleh Indonesia membuat politisi memperebutkan segmen pemilih partisan yang terbatas (hanya 15% dari populasi), sehingga memaksa mereka melebarkan definisi pemilih partisan yang tidak sekadar dekat dengan partai, tetapi juga terkoneksi dengan jejaring personal politisi atau timsesnya.

Perbedaan konteks struktural dan institusional inilah yang membuat strategi pembelian suara di Indonesia relatif berbeda ketimbang model pemilihan-gambang dan pemilihan-inti yang berkembang di Amerika Latin. Studi ini menemukan bahwa politisi di Indonesia pada awalnya berangkat dari pendekatan pemilihan-inti, yang menekankan pembelian partisipasi (*turnout buying*) dengan target pemilih partisan, tetapi kemudian dikombinasikan dengan penekanan kuat pada jejaring personal. Di Indonesia, para kandidat dan pialang suara sebenarnya bermaksud menarget pemilih partisan, tetapi pada kenyataannya justru lebih banyak membagikan amplop dan bantuan kepada orang-orang yang terkoneksi dengan para operator politik melalui *personal networks*. Studi ini menyebut kombinasi strategi ini sebagai “*personal loyalist strategy*” (strategi loyalis personal). Dengan tanpa mengabaikan peran pemilih partisan, strategi loyalis personal ini mencoba untuk mempersonalisasikan kelompok partisan agar mereka tidak hanya loyal kepada partainya, tetapi juga kepada individu kandidat dalam partai yang bersangkutan. Pemilih partisan dipersonalisasi menjadi aset elektoral caleg secara pribadi karena dalam sistem proporsional terbuka caleg dengan suara terbanyaklah yang mewakili kursi yang diperoleh partai.

Jadi strategi loyalis personal muncul dalam konteks sistem proporsional terbuka di mana (1) politisi dipaksa untuk bersaing melawan rival internal partai guna mendapatkan *personal votes*; (2) karena persaingan internal, mereka mau tidak mau mengandalkan jejaring personal mereka sendiri ketimbang struktur partai; dan (3) karena sistem ini mengandaikan caleg dengan suara terbanyak yang meraih kursi, mereka hanya perlu mengantongi ‘segelintir’ suara untuk mengalahkan saingan internal mereka. Dengan sumber daya logistik yang terbatas tapi harus berurusan dengan cakupan dapil yang besar, caleg cenderung memprioritaskan daerah atau pemilih yang secara tradisional dianggap basis partai mereka —yang dianggap akan menjadi tambang suara terbesar bagi *personal votes* mereka juga.

Namun, mengingat basis loyalis partai terbatas jumlahnya dan diperebutkan oleh caleg-caleg dalam satu partai, maka setiap kandidat akan berusaha mati-matian melakukan ‘personalisasi’ basis pemilih partai dalam upaya mendapatkan suara yang mencoblos nama caleg yang paling banyak (*the most intraparty votes*). Seorang pemilih mungkin memiliki preferensi elektoral kepada suatu partai, tapi dalam sistem proporsional terbuka mereka bisa memilih kandidat tertentu di dalam partai tersebut. Ini berarti bahwa pilihan personal mereka terhadap kandidat tertentu dibanding caleg lain dalam satu partai sangat menentukan kandidat mana yang unggul. Bahkan pemilih yang hanya memilih partai tanpa menunjukkan preferensi individual kepada kandidat tertentu, meskipun membantu meningkatkan peluang partai tersebut mendapatkan kursi, metode memilih semacam itu tidak memiliki dampak langsung pada penentuan prospek kemenangan caleg.

Atas dasar itu, para kandidat mendefinisikan apa yang disebut pemilih basis bukan hanya berdasarkan rekam jejak elektoral pada pemilu-pemilu sebelumnya, tetapi juga berdasarkan relasi personal dengan kandidat. Jejaring personal ini biasanya mencakup tempat kelahiran kandidat, kekerabatan, jaringan etnis dan agama. Pemilih loyal kadang diukur sekadar dari hubungan patronase, apakah sekelompok pemilih pernah mendapat bantuan pribadi atau pernah menerima manfaat pembangunan skala kecil seperti perbaikan jalan, masjid, sekolah atau irigasi. Selain itu, para kandidat pada umumnya memanfaatkan jaringan yang dimiliki oleh armada timses mereka. Singkat kata, pada situasi di mana sistem pemilu proporsional terbuka mendorong persaingan intrapartai, para caleg akan cenderung mempersonalisasi basis tradisional partai mereka dan memprioritaskan koneksi personal yang dimediasi oleh timses.

Tabel 7 berikut meringkaskan perbedaan-perbedaan prediksi model loyalitas personal yang saya tawarkan dibanding teori-teori politik uang yang lain berdasarkan beberapa dimensi. Ada tiga dimensi yang mencakup variabel-variabel spesifik yang dibandingkan. Dimensi pertama adalah ‘Faktor-faktor Kontekstual’ yang mengulas kerangka institusional dan non-institusional yang menentukan kompetisi elektoral di mana model-model politik uang akan diberlakukan. Dimensi kedua, ‘Karakteristik Pembelian Suara’ yang merangkum bentuk atau format pembelian suara yang terjadi pada setiap model. Terakhir, tabel ini juga membedakan efek elektoral pembelian suara terhadap pilihan suara dan kehadiran pemilih di bilik suara antara strategi loyalis personal dengan teori-teori politik uang yang lain.

TABEL 7

PERBEDAAN MODEL-MODEL POLITIK UANG: MEMBANDINGKAN TEORI LOYALITAS PERSONAL DENGAN PREDIKSI TEORI-TEORI LAINNYA

VARIABEL	LOYALIS PERSONAL	PEMILIH MENGAMBANG	PEMILIH INTI	INFORMASIONAL	NORMA TIMBAL-BALIK	
Faktor kontekstual	Organisasi partai	Lemah	Kuat	Kuat	Lemah	Tak Jelas
	Pemilu wajib	Tidak	Ya	Tidak	Tak Jelas	Tak Jelas
	Kerahasiaan suara	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
	Berpusat kandidat	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi	Tak Jelas
	Basis partai	Lemah	Kuat	Kuat	Lemah	Kuat
	Preferensi partisan	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Tak Jelas
Karakteristik Politik Uang	Struktur	Individu kandidat	Partai	Partai	Tak Jelas	Partai
	Tujuan	Margin kemenangan	Tinggi	Kehadiran	Kredibilitas	Pilihan suara
	Target	Campuran	Kuat	Loyal	Membraur	Resiprokal
	Biaya	Mahal	Rendah	Murah	Mahal	Tak Jelas
	Jenis tim sukses	Non-partai	Partai	Partai	Tak Jelas	Partai
	Pemantauan tim sukses	Rendah	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tak Jelas
	Legalitas	Illegal	Illegal	Illegal	Area abu-abu	Illegal
	Pengawasan pemilih	Lemah	Kuat	Kuat	Lemah	Sama sekali tidak
	Lokasi	Privat	Privat	Privat	Publik	Privat
	Eksistensi orang kuat	Tidak	Tak Jelas	Ya	Tak Jelas	Tidak
Jaringan pribadi	Ya	Tak Jelas	Tak Jelas	Tak Jelas	Ya	
Dampak elektoral	Pilihan suara	Kecil tapi menentukan	Ya	Tidak	Ya	Ya
	Kehadiran pemilih	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

11

Kesimpulan: Dari Desain Institusi Klientelistik ke Programatik

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Saya telah berusaha menjawab pertanyaan yang sudah lama menghantui akademisi tentang berapa banyak warga di Indonesia yang terpapar politik uang dalam pemilu-pemilu di Indonesia. Dengan menggunakan data historis berdasarkan survei yang representatif saya telah menunjukkan betapa sentralnya politik uang dalam kompetisi elektoral. Jika kita menggunakan estimasi tertinggi, sedikitnya sepertiga pemilih atau satu dari tiga pemilih di Indonesia mengaku pernah ditarget langsung oleh politik uang pada pemilu 2014 dan 2019. Proporsi ini membuat Indonesia berada di ranking ketiga negara yang tingkat politik uangnya paling tinggi di dunia.

Studi ini telah berhasil menunjukkan betapa politik uang telah menjadi praktik normal baru dalam pemilu pasca-Orde Baru. Untuk itu, studi ini merekomendasikan perubahan desain institusional, penegakan hukum, dan pendidikan kewargaan dalam rangka mengurangi praktik politik uang. Diakui atau tidak, penerapan sistem proporsional terbuka membuka ruang bagi praktik klientelisme. Jadi jika sistem pemilu tidak dievaluasi atau paling tidak dimodifikasi, pada tingkat *supply-side*, caleg akan tetap mengandalkan politik uang sebagai senjata pamungkas merebut *personal vote* untuk mengalahkan rival separtainya. Akibatnya, pemilu gagal menjadi instrumen dalam melahirkan pejabat publik yang berintegritas. Dalam sistem proporsional terbuka, pemilu menjadi arena pertarungan kekuatan finansial dan popularitas personal.

Untuk itu, perlu evaluasi menyeluruh sistem pemilu dari proporsional terbuka

ke proporsional tertutup. Dalam rangka mengurangi praktik klientelistik dan agar bergerak ke arah politik yang lebih programatik, Indonesia perlu didorong ke arah sistem kompetisi elektoral yang lebih berbasis partai. Mengubah lingkup persaingan dari kompetisi antara kandidat perseorangan ke kompetisi antar-partai akan mengurangi kebutuhan untuk menggunakan metode pembelian suara untuk mendapatkan *personal votes*. Selain itu, dalam *closed-list multi-member districts*, pemilih mencoblos gambar atau nama partai-partai dan nomor urut caleg dalam daftar partai yang ditetapkan oleh partai. Karena warga tidak diperkenankan menunjukkan preferensi pribadi mereka kepada kandidat tertentu, sistem pemilu ini mengarah pada pemilu yang berpusat pada partai. Akibatnya, dalam sistem proporsional tertutup, pemilih “dipaksa” berkonsentrasi pada kebijakan partai daripada ketokohan personal caleg, sehingga meningkatkan kohesi partai, mengurangi perselisihan internal, dan memusatkan kepemimpinan partai. Seperti dikemukakan Norris (2006: 105), sistem proporsional tertutup “mendorong politisi untuk menawarkan kebijakan programatik, fokus pada rekam jejak kolektif dan program partai mereka masing-masing, serta memperkuat disiplin dan kohesi partai di parlemen.” Ketika *personal votes* tidak lagi menentukan kemenangan seorang caleg, dan kampanye lebih berfokus pada platform partai daripada ketokohan dan hubungan pribadi kandidat, dan transaksi klientelistik.

Timor-Leste adalah contoh menarik bagaimana sistem proporsional tertutup mengurangi insentif partai politik atau caleg dalam memakai taktik suap di pemilu. Meskipun *demand-side* pemilih Timor-Leste terhadap politik uang termasuk tinggi di mana 33% warga menilai politik uang itu wajar dalam Pemilu 2017, insiden politik uang di negara tersebut sangat jarang terjadi. Hanya 4% pemilih yang mengaku disasar politik uang (Lembaga Survei Timor Leste 2017). Hal ini terjadi karena sistem proporsional tertutup yang dipakai Timor-Leste menjadikan partai politik sebagai pemain utamanya. Akibatnya *supply-side* politik uang menjadi terbatas. Tentu sistem proporsional tertutup bukannya tanpa cela. Pada Pemilu 1999 di Indonesia, sistem ini terbukti mendorong oligarki elit dan praktik suap di tingkat elit guna mendapat nomor urut jadi. Karena nomor urut menentukan kursi mana yang dimiliki partai, pemilih seperti memilih kucing dalam karung. Pada saat kepercayaan terhadap partai masih rendah, sistem proporsional tertutup juga problem karena pemilih diminta memilih partai yang masih bermasalah. Sistem ini juga membuat politisi lebih merasa bertanggung jawab kepada elit partai ketimbang konstituen. Namun, paling tidak sistem proporsional tertutup

mampu mengurangi praktik politik uang di tingkat massa, meningkatkan peran partai politik dalam pertarungan elektoral dan ujungnya mampu meningkatkan pelembagaan partai politik. Untuk mereduksi oligarki elit, sistem proporsional tertutup bisa dibarengi dengan *primary election* atau konvensi di internal partai politik untuk menyaring caleg yang kredibel sembari mengurangi oligarki dan praktik suap di tingkat elit.

Pada saat ini kesepakatan elit politik adalah sistem proporsional terbuka masih lebih baik dibanding sistem proporsional tertutup. Jika sistem proporsional terbuka tetap diterapkan, redesain elektoral diperlukan untuk mencegah caleg melakukan politik uang. Salah satunya adalah dengan mengurangi *district magnitude*. Studi-studi menunjukkan semakin sedikit kursi yang diperebutkan di sebuah dapil, semakin sedikit insentif bagi para caleg untuk menginvestasikan sumberdaya untuk jual beli suara (Carey dan Shugart 1995; Chang 2005). Hal ini karena kandidat memerlukan suara jauh lebih banyak untuk mendapatkan kursi. Selain itu, aktor politik yang bermain lebih sedikit dan caleg yang ingin mengejar kursi “sisa” dalam dapil yang memiliki *magnitude* besar akan berkurang seiring dengan *district magnitude* yang mengecil. Sebaliknya, makin besar kursi yang tersedia di sebuah dapil, kandidat hanya perlu sedikit suara untuk mendapatkan kursi, sehingga mereka akan menggunakan politik uang sebagai resep mujarab agar terpilih.

Selain opsi kebijakan di atas, sistem pemilu distrik juga bisa menjadi pilihan. Studi telah menunjukkan bahwa sistem distrik, terutama yang bercirikan *single member constituency*, mendorong pertanggungjawaban politik ke konstituen lebih besar dan terbukti mengurangi politik uang (contohnya, Maisrikrod 2002: 196). Ini terjadi karena hanya satu wakil yang terpilih dalam satu dapil sehingga insentif melakukan politik uang semakin berkurang. Sistem distrik juga menggunakan *the winner takes all* di mana caleg yang mendapat suara terbanyaklah yang mewakili dapil tanpa memperhitungkan selisih perolehan suara. Intinya, karena dalam sistem distrik hanya satu wakil yang terpilih dalam satu dapil, maka insentif caleg dalam menggunakan politik uang, sebagaimana terjadi dalam sistem *multi-member constituency*, menjadi berkurang drastis. Masalahnya adalah sistem ini dianggap merugikan partai menengah dan kecil serta dikhawatirkan menimbulkan masalah besar terkait pluralisme politik di Indonesia.

Di atas segalanya, politik uang akan merajalela jika tidak ada penegakan hukum. Berdasarkan puluhan caleg tingkat DPR RI yang saya wawancarai, sebagian besar mengatakan bahwa praktik ini marak karena yakin tidak ada sanksi

tegas bagi para pelakunya. Perlu sanksi yang tegas dan berat sebagai efek jera kepada pelaku dan memberi sinyal kepada para caleg bahwa mereka takkan dibiarkan jika melakukan politik uang. Karena *demand-side* pemilih terhadap politik uang yang tinggi, perlu pendidikan pemilih secara sistematis agar warga tidak toleran terhadap praktik ini. KPU, Bawaslu, media massa, dan LSM harus bersinergi melakukan pendidikan politik kepada warga tentang bahaya politik uang, terutama kemungkinan terjadinya apa yang disebut Stokes (2005) sebagai “akuntabilitas terbalik” (*perverse accountability*). Dalam demokrasi, rakyatlah yang berhak menuntut pertanggungjawaban politisi. Tapi jika politisi telah membeli suara, maka pemilihlah yang justru dimintai pertanggungjawaban karena mereka sudah menukar mandat demokratik yang mereka miliki dengan harga yang murah.

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Demikian orasi ilmiah yang bisa saya sampaikan dalam forum yang mulia ini. Semoga bisa sedikit memberikan kontribusi akademik bagi studi tentang politik klientelisme di Indonesia. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pidato ilmiah ini. Sebagaimana aturan baku dalam dunia akademik, saya bertanggung jawab penuh atas jika terdapat kekurangtepatan dan ketidakkonsistenan dalam naskah ilmiah ini.

Ijinkan sebagai penutup pidato saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada sejumlah pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam pelbagai aspek sehingga mengantarkan saya meraih jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Politik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kampus UIN Syarif Hidayatullah, tempat saya tumbuh dan mengenal dunia. Di Ciputat inilah saya ditempa sebagai mahasiswa S1 di Jurusan Tafsir Hadits, kemudian melanglang buana ke negeri “Down Under” untuk menyelesaikan studi S2 dan S3 bidang Ilmu Politik di Australian National University (ANU), Canberra. Terima kasih kepada Forum Mahasiswa Ciputat (FORMACI), “kampus kedua” saya di Ciputat tempat saya mengasah pisau analisis ilmu-ilmu sosial. Terima kasih layak saya haturkan kepada lembaga survei tempat saya bernaung selama ini: Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indikator Politik Indonesia. LSI dan Indikator juga mempersilakan saya memanfaatkan “harta karun” data opini publik yang berkaitan dengan politik uang sejak 2006 hingga 2019 bagi kepentingan studi saya selama ini.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para senior dan kolega yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Almarhum Prof. Nurcholish Madjid, Prof. Azyumardi Azra, Prof. Komaruddin Hidayat, Prof. Bahtiar Effendy, Fachry Ali, Prof. Jamhari, Prof. Oman Fathurrahman, Prof. Ali Muharif, Dr. Hendro Prasetyo, Prof. Zulkifli, Prof. Ahmad Tholabi, Prof. Dzuriyaton Toyibah, Prof. Adlin Sila, Ihsan Ali-Fauzi, Dr. Djayadi Hanan, Dr. Kuskridho Ambardi, dan lain-lain. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada senior yang selama ini menjadi sumber inspirasi, Prof. Saiful Mujani dan telah memperkenalkan saya pada tradisi penelitian ilmu sosial yang berorientasi empiris. Terima kasih pula kepada Prof. Edward Aspinall, Ketua Panel disertasi saya, yang memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan intelektual saya. Saya merasa beruntung terlibat riset kolaboratif mengenai *money politics* di empat negara Asia Tenggara yang diinisiasi Prof. Aspinall bersama para peneliti utama lainnya (Prof. Allen Hicken, Prof. Meredith Weiss, dan Prof. Paul Hutchcroft). Terima kasih kepada para pembimbing disertasi saya yang lain: Prof. Marcus Mietzner, Prof. Greg Fealy, dan Prof. Juliet Pietsch.

Akhirnya, saya harus menyampaikan terima kasih yang terdalam kepada istri tercinta saya, Rahmawati Madanih, dan anak-anak terkasih, Rayhan Adnan Musthafa, Avicenna Ananda Musthafa, dan Alexa Shakira Musthafa. Saya juga berutang budi kepada orang tua, almarhum H. Muhtadi, Hj. Siti Mas'udah, Hj. Siti Maryam, H. Madani, Hj. Rokibah dan Hj. Siti Nazulah. Tanpa dorongan dan dukungan tiada henti dari mereka, saya tidak akan mencapai karier tertinggi dalam dunia akademik ini.

Burhanuddin Muhtadi



KUASA UANG

POLITIK UANG
DALAM PEMILU
PASCA-ORDE BARU

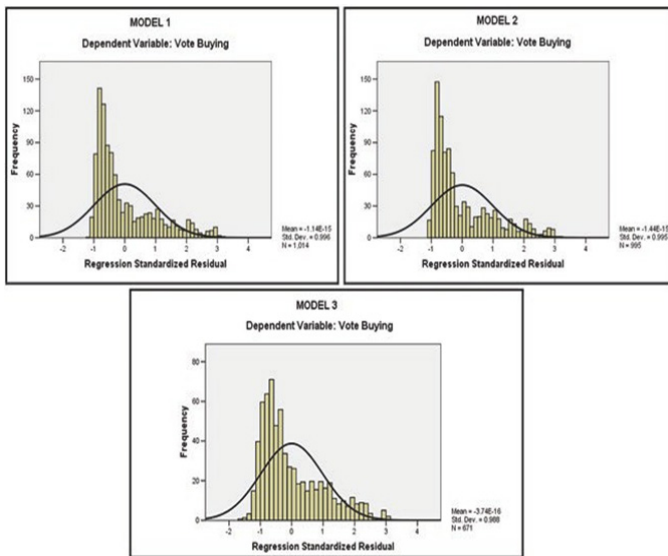


DAFTAR APPENDIKS

LAMPIRAN 1

Uji Normalitas Analisis Regresi Linier atas Faktor Determinan Politik Uang

Berdasarkan hasil uji normalitas di bawah ini, distribusi data secara empiris (histogram) pada Model 1 tidak berbentuk lonceng. Demikian pula, histogram di Model 2 dan Model 3 tidak menyerupai distribusi normal, menunjukkan bahwa residual tidak terdistribusi secara normal.



LAMPIRAN 2

Analisis Regresi Logistik atas Faktor-Faktor Determinan Politik Uang

Variabel dependen adalah variabel dikotomis, di mana nilai 1 jika responden menerima tawaran pembelian suara, baik sekali/dua kali, beberapa kali, jarang, cukup sering, maupun sangat sering.

	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 3	
	Sosio-Demografi		Keterlibatan Kewargaan		Sikap Politik	
	<i>b</i>	<i>S.E</i>	<i>b</i>	<i>S.E</i>	<i>b</i>	<i>S.E</i>
Sosio-Demografi						
Gender (Laki-laki)	0,266*	0,129	0,236	0,130	0,103	0,170
Desa	0,032	0,146	0,001	0,149	0,331	0,194
Usia	-0,012*	0,005	-0,013*	0,005	-0,010	0,007
Pendidikan	0,069*	0,031	0,052	0,032	0,059	0,042
Pendapatan	0,020	0,022	0,023	0,023	-0,035	0,030
Agama (Muslim)	0,555*	0,225	0,592**	0,228	0,880**	0,288
Etnis (Jawa)	0,071	0,144	0,052	0,146	0,192	0,188
Wilayah (Jawa)	0,044	0,152	0,004	0,154	-0,058	0,197
Keterlibatan Kewargaan						
Keterlibatan sosial			0,293	0,568	-0,689	0,714
Sikap Politik						
Party ID/sikap partisan					0,392**	0,123
Efikasi politik					-0,424*	0,193
Ketertarikan politik					0,290***	0,077
Informasi politik					0,082	0,144
Partisipasi politik					0,097	0,196
Kepercayaan politik					0,126	0,177
Dukungan demokrasi					-0,205	0,178
<hr/>						
Konstanta	0,154**	0,055	0,168**	0,056	0,204	0,144
Adjusted R2	0,017		0,015		0,063	
Valid N	1014		995		671	

Keterangan: *b* = koefisien yang tidak terstandarkan, **p* < 0,05; ***p* < 0,01; ****p* < 0,001

REFERENSI

- Alejo, MJ, ME Rivera, dan NM Valencia. 1996. *[De]Scribing Elections: A Study of Elections in the Lifeworld of San Isidro*. Quezon City: Institute for Popular Democracy (IPD).
- Aspinall, E. 2014. "When Brokers Betray: Social Networks and Electoral Politics in Indonesia." *Critical Asian Studies* 46(4): 545–570.
- Aspinall, E. and Sukmajati, M. (eds) 2016. *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS Press.
- Aspinall, E., Rohman, N., Hamdi, A.Z., Rubaidi, and Triantini, Z. 2017. "Vote Buying in Indonesia: Candidate Strategies, Market Logic and Effectiveness." *Journal of East Asian Studies* 17: 1–27.
- Auyero, J. 2001. *Poor People's Politics: Peronist Networks and the Legacy of Evita*. Durham, NC: Duke University Press
- Brusco, V., M. Nazareno, dan S. Stokes. 2004. "Vote Buying in Argentina". *Latin American Research Review*, 39(2).
- Callahan, WA. 2005. "Social Capital and Corruption: Vote Buying and the Politics of Reform in Thailand". *Perspective on Politics*, 3(3): 495–508
- Campbell, A., PE Converse, W. Miller, dan D. Stokes. 1960. *The American Voter*. New York: John Wiley & Sons.
- Carey, J. dan MS Shugart. 1995. "Incentives to Cultivate a Personal Vote: A Rank Ordering of Electoral Formulas". *Electoral Studies*, 14(4): 417–435.
- Chang, ECC. 2005. "Electoral Incentives for Political Corruption under Open-list Proportional Representation". *Journal of Politics*, 67(3): 716–730.
- Choi, N. 2007. "Local Elections and Democracy in Indonesia: The Riau Archipelago." *Journal of Contemporary Asia* 37(3): 326–345.
- Corstange, D. 2012. "Vote Trafficking in Lebanon." *International Journal Middle East Studies* 44: 483–505.
- Cox, GW dan MD McCubbins. 1986. "Electoral Politics as a Redistributive Game". *The Journal of Politics*, 48(2): 370–389.

- Dalton, R.J. 2016. *Party Identification and Its Implications. Politics: Oxford Research Encyclopedias*. USA: Oxford University Press.
- De Jonge, C.P.K. 2015. "Who Lies about Electoral Gifts? Experimental Evidence from Latin America". *Public Opinion Quarterly*, 79(3): 710–739.
- Diaz-Cayeros, A., F. Estévez, dan B. Magaloni. 2012. "Strategies of Vote Buying: Democracy, Clientelism and Poverty Relief in Mexico". [https://web.stanford.edu/~magaloni/dox/2012strategiesvote - buying.pdf](https://web.stanford.edu/~magaloni/dox/2012strategiesvote-buying.pdf).
- Dixit, A. dan J. Londregan. 1996. "The Determinants of Success of Special Interests in Redistributive Politics". *Journal of Politics*, 58(4): 1.132–1.155.
- Dunning, T. and Stokes, S. 2008. "Clientelism as Persuasion and as Mobilization." Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, 28–31 August, Boston, MA.
- Gans-Morse, J., S. Mazza, dan S. Nichter. 2014. "Varieties of Clientelism: Machine Politics during Elections". *American Journal of Political Science*, 58(2): 415–432.
- Gonzalez-Ocantos, E., de Jonge, C.K., Meléndez, C., Osorio, J., and Nickerson, D.W. 2012. "Vote Buying and Social Desirability Bias: Experimental Evidence from Nicaragua." *American Journal of Political Science* 56(1): 202–217.
- Guardado, J. dan L. Wantchekon. 2014. "Do Electoral Handouts Affect Voting Behavior?" Working Paper No. 171 Afrobarometer.
- Hadiz, V.R. 2010. *Localising Power in Post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford: Stanford University Press.
- Hellevik, O. 2007. "Linear versus Logistic Regression when the Dependent Variable is a Dichotomy". *Quality & Quantity*, 43(1): 59–74. <http://doi.org/10.1007/s11135-007-9077-3>.
- Hicken, A., Aspinall, E., Weiss, M., and Muhtadi, B. 2022. "Buying Brokers: Electoral Handouts beyond Clientelism in a Weak-Party State." *World Politics*, 1–44.
- Hicken, A. 2011. "Clientelism." *Annual Review Political Science*. Viewed at <http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.polisci.031908.220508>.
- . 2007a. "How Do Rules and Institutions Encourage Vote Buying?" In: F.C. Schaffer (ed) *Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying*. Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc.
- . 2007b. "How Effective Are Institutional Reforms?" In: F.C. Schaffer (ed) *Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying*. Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc.
- Hidayat, S. 2007. 'Shadow State'? Business and Politics in the Province of Banten.

- In: H. Schulte-Nordholt and G. van Klinken (eds) *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Huntington, S. 1991. *The Third Wave: Democratisation in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Kerkvliet, B.J. 1991. "Understanding Politics in a Nueva Ecija Rural Community". Dalam B. Kerkvliet dan R. Mojares (ed.). *From Marcos to Aquino: Local Perspectives on Political Transition in the Philippines*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Larcinese, V., JM Snyder Jr, dan C. Test. 2012. "Testing Models of Distributive Politics Using Exit Polls to Measure Voters' Preferences and Partisanship". *British Journal of Political Science*, November: 1–31.
- Lembaga Survei Timor Leste (The Timor-Leste Survey Institute) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), "Exit Poll: Eleisaun Parlarmentar Timor-Leste", 22 Juli 2017.
- Lindbeck, A. and Weibull, J.W. 1987. "Balanced-budget Redistribution as the Outcome of Political Competition." *Public Choice* 52: 273–297.
- Maisrikrod, S. 2002. "Political Reform and the New Thai Electoral System." Dalam J.F. Hsieh dan D. Newman (eds). *How Asia Votes*. New York: Chatham House.
- Muhtadi, B. 2013a. "Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi 'Party ID' dan Patron-Klien". *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10/No. 1: 41–58.
- , 2013b. *Laporan Survey Sikap dan Perilaku Pemilih Terhadap Money Politics*. Jakarta: Indikator.
- , 2015. "Money Politics and the Prisoner's Dilemma". *New Mandala*, 16 November 2015. <http://www.newmandala.org/money-politics-and-the-prisoners-dilemma/>.
- , 2018a. "Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, and Winning Margins". A PhD thesis for the degree of doctor of philosophy, The Australian National University.
- , 2018b. "Komoditas Demokrasi: Efek Sistem Pemilu terhadap Maraknya Jual Beli Suara". Dalam Mada Sukmajati dan Aditya Perdana. *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Bawaslu
- , 2018c. "A third of Indonesian voters bribed during election—how and why". *The Conversation*, 20 Juli 2018. Diakses dari <https://theconversation.com/a-third-of-indonesian-voters-bribed-during-election-how-and-why-100166>.

- . 2019a. "Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru". *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 5, No. 1: 55–74
- . 2019b. *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Singapore: Springer Nature
- Nichter, S.C. 2008. "Vote Buying or Turnout Buying? Machine Politics and the Secret Ballot." *American Political Science Review*, 102(1):19–31.
- Norris, P. 2006. "Recruitment". Dalam RS Katz dan WJ Crotty (ed.). *Handbook of Party Politics*. London: Sage Publications.
- Ronji, M. "H. Muhtadi Penggagas Kotak NU Rembang Wafat." Nur FM. Rabu, 10 Februari 2021, <https://www.nurfmrembang.com/nahdlatul-ulama/h-muhtadi-penggagas-kotak-nu-rembang-wafat>
- Schaffer, FC dan A. Schedler. 2007. "What is Vote Buying?" Dalam FC Schaffer (ed.). *Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying*. Boulder: Lynne Reinner.
- Scott, J. 1969. "Corruption, Machine Politics, and Political Change". *The American Political Science Review*, 43: 1.142–1.158.
- Stokes, SC, T. Dunning, M. Nazareno, dan V. Brusco. 2013. *Brokers, Voters and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics*. New York: Cambridge University Press.
- Stokes, SC. 2005. "Perverse Accountability: A Formal Model of Machine Politics with Evidence from Argentina". *American Political Science Review*, 99(3): 315–325.
- Van Deth, J.W. 1983. "The Persistence of Materialist and Postmaterialist Value Orientation". *European Journal of Political Research*, 11: 63–79.
- Van Ham, C. dan S. Lindberg. 2015. "Vote Buying is a Good Sign: Alternate Tactics of Fraud in Africa 1986–2012". Working Paper No. 3, The Varieties of Democracy Institute.
- Verba, S. dan N. Nie. 1972. *Participation in America*. New York: Harper and Row.
- Vicente, PC. 2013. "Is Vote-buying Effective? Evidence from a Field Experiment in West Africa". *The Economic Journal*. [http:// onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eoj.12086/pdf](http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eoj.12086/pdf).
- Walker, A. 2014. "Vote Buying–Commodity or Gift?" *New Mandala*, 13 April 2014. www.newmandala.org/vote-buying-commodity-or-gift/.
- Wang, T. 2013. "Talking to Strangers: Chinese Youth and Social Media". Disertasi pada University of California, San Diego, Amerika Serikat.



DILEMA PKS
Suara dan Syariah

Burhanuddin Muhtadi
Pengantar: Greg Fealy & Anis Matta

TESTIMONI PARA AHLI DAN ASOSIASI DUNIA



Prof. William Liddle
Ohio State University, USA

Burhanuddin Muhtadi's analysis of vote-buying in post-democratization Indonesia is original, profound, subtle, nuanced, and convincing as well as beautifully organized and well written. Equally important, its imaginative policy prescriptions will be widely read and cited as a significant contribution to the literature of comparative electoral politics.

Analisis politik uang yang didedahkan Burhanuddin Muhtadi di Indonesia pasca-reformasi ini adalah orisinal, mendalam, subtil, bernuansa, meyakinkan dan terorganisir secara indah serta ditulis secara memikat. Tak kalah pentingnya, resep kebijakan imajinatif yang ditawarkan studi ini akan banyak dibaca dan dikutip sebagai kontribusi signifikan terhadap literatur komparatif politik elektoral di dunia.



Prof. Allen Hicken
Universitas Michigan, USA

This study contains a trove of interesting research questions, a novel theoretical contribution, impressive empirical work, and a deep and nuanced understanding of the Indonesian case.

Studi Burhanuddin Muhtadi ini berisi rangkuman pertanyaan penelitian yang memikat, kontribusi teoritik baru yang memukau, karya empirik yang mengesankan, dan pemahaman yang mendalam dan bernuansa tentang politik klientelisme di Indonesia.



Prof. Edward Aspinall

Australian National University (ANU), Australia

This study presents a pathbreaking analysis of vote-buying in Indonesia. Drawing on a stunning array of evidence, Burhanuddin Muhtadi reveals the mechanics, patterns and effects of vote-buying with unprecedented clarity. It is a must read for anyone interested in Indonesian politics or in the comparative politics of clientelism.

Studi Burhanuddin Muhtadi ini menyajikan terobosan analisis yang menarik tentang praktik jual beli suara di Indonesia. Dengan menggunakan rangkaian metode dan data yang menakjubkan, ia memaparkan mekanisme, pola dan efek elektoral politik uang secara jelas dan mengagumkan. Studi ini adalah bacaan wajib bagi siapapun yang tertarik dengan politik Indonesia khususnya, dan politik komparatif tentang klientelisme pada umumnya.



Prof. Ward Berenschot

Professor of Comparative Political Anthropology,
University of Amsterdam and Senior Researcher, KITLV

This is a rich study that makes an important contribution on an equally important topic: vote buying is practiced and organised, how common and effective it is and, particularly important, why candidates engage in it while these monetary incentives appear to influence only a limited number of people. This study stands out for the wealth of its survey material, its engagement with the literature on vote buying, the clarity of writing and structure as well as the clarity of its main arguments.

Ini adalah studi yang kaya yang memberikan kontribusi penting pada topik yang tak kalah penting: praktik dan pengorganisasian politik uang, seberapa lazim dan efektif taktik klientelistik ini, dan, tak kalah menarik, mengapa politisi terlibat dalam aksi jual beli suara sementara efek elektoralnya terlihat tidak signifikan. Studi Burhanuddin Muhtadi ini menonjol karena data-data surveinya yang melimpah ruah, keterlibatan yang intensif dengan literatur komparatif tentang klientelisme, kejelasan penulisan dan struktur serta argumen utama yang terang benderang.



Asian Studies Association of Australia (ASAA)

I'm writing to you in my capacity as the President of the Asian Studies Association of Australia to advise you of the outcome of the Early Career Book prize in which your book was entered. While your book was not chosen as the winner, I'm very pleased to inform you that the judging panel awarded it a high commendation. The panel, which consisted of Professor Melissa Crouch (UNSW), Prof. Tamara Jacka (ANU) and Prof. Robin Jeffrey (La Trobe) had this to say:

Burhanuddin Muhtadi (2019) *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Palgrave Macmillan. Members of the panel commended the book highly. They were impressed by the application of mixed methods, including quantitative analysis, to explain the patterns and effectiveness of vote-buying in Indonesia.

Saya mengirim email kepada Anda dalam kapasitas saya sebagai Presiden Asian Studies Association of Australia untuk memberi tahu Anda tentang hasil the Early Career Book prize di mana buku Anda salah satu yang dinilai. Meskipun buku Anda tidak terpilih sebagai pemenang, dengan senang hati saya informasikan bahwa panel juri memberikan penghargaan yang tinggi kepada buku tersebut. Panel yang terdiri dari Associate Professor Melissa Crouch (UNSW), Prof. Tamara Jacka (ANU) dan Prof. Robin Jeffrey (La Trobe) menyampaikan hal berikut:

*Burhanuddin Muhtadi (2019) *Jual Beli Suara di Indonesia: Mekanisme Suap Pemilu*. Palgrave Macmillan. Komite panel sangat memuji buku tersebut. Mereka sangat terkesan dengan penerapan mixed methods, termasuk analisis kuantitatif, untuk menjelaskan pola dan efektivitas politik uang di Indonesia.*



Burhanuddin Muhtadi, Ph.D.

POPULISME POLITIK IDENTITAS & DINAMIKA ELEKTORAL

*Mengurai Jalan Panjang
Demokrasi Prosedural*

— Pengantar oleh —

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.U.

גורם המרכזי בהנהגת הממשלה והתפקידים המרכזיים בהנהגת הממשלה
במסגרת הממשלה והתפקידים המרכזיים בהנהגת הממשלה

Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A., C.B.E.

במסגרת הממשלה והתפקידים המרכזיים בהנהגת הממשלה
במסגרת הממשלה והתפקידים המרכזיים בהנהגת הממשלה



PROFIL SINGKAT

BURHANUDDIN MUHTADI

Burhanuddin Muhtadi adalah seorang dosen, penulis, analis politik sekaligus Pendiri dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia; ia menjadi dosen di Prodi Ilmu Politik sejak FISIP UIN Syarif Hidayatullah berdiri. Selain sebagai akademisi, dia juga dikenal sebagai peneliti tamu di ISEAS Yusof Ishak Institute, Singapura sejak 2021 sampai sekarang. Ia juga menjadi peneliti senior sekaligus salah satu direksi Lembaga Survei Indonesia (LSI). Dia meraih doktor bidang ilmu politik dari Australian National University (ANU) pada 2018 dengan disertasi bertajuk “Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, and Winning Margins.” Burhanuddin meraih gelar Master dari kampus yang sama, ANU, juga dengan spesialisasi politik di Indonesia pada 2008. Gelar sarjana strata satu diraih dari IAIN (sekarang UIN), Jakarta pada 2002.

Sebagai akademisi, Burhanuddin aktif menulis banyak paper yang dimuat di jurnal-jurnal top dunia dan publikasi internasional, di antaranya *Journal of East Asian Studies*, *Asian Studies Review*, *Pacific Affairs*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *Contemporary Southeast Asia* and *Asian Journal of Social Science* and high-ranked disciplinary journals like *World Politics*, *Third World Quarterly*, *International Journal of Public Opinion Research*, *Party Politics*, *Democratization*, *International Journal of Communication*, *Electoral Studies*, *Graduate Journal of Asia-Pacific Studies*, dan *Asian Journal of Social Policy*. Ia juga mengisi blog-blog akademik seperti

Brookings, ISEAS Perspective, *The Conversation*, *East Asia Forum*, *New Mandala*, *Indonesia at Melbourne*. Dia juga aktif di konferensi-konferensi internasional, di antaranya Indonesia Update di Australian National University, University of Oxford, National University of Singapore, Vienna University, University of Sydney, Kyoto University, dan lain-lain.

Burhanuddin aktif menulis buku, termasuk buku bertajuk *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery* yang diterbitkan penerbit bergengsi Palgrave McMillan pada Mei 2019. Dia juga menulis buku sekaligus editor *Civil Society dan Demokrasi: Survei tentang Partisipasi Sosial-Politik* (Jakarta: INCIS, 2003), *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia* (Jakarta: INCIS, 2004), dan *Defisit Pelayanan Publik: Survei Opini Publik* (Jakarta: INCIS, 2005). Beberapa tulisannya dimuat juga dalam buku co-authorship seperti “The 1998 Student Uprising in Indonesia: A Social Movement Theory Approach,” dalam buku *Enlightenment from Within* (Canberra: Minaret, 2007) dan “Ke Cak Nur, Saya Mengaji,” dalam buku *Cak Nur di Mata Kaum Muda* (Jakarta: Paramadina, 2008). Bukunya yang berjudul *Dilema PKS: Suara dan Syariah* yang diterbitkan Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) menjadi salah satu buku akademis laris selama 2012. Ia juga menulis buku *Perang Bintang 2014: Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres* (Noura Book, 2013).

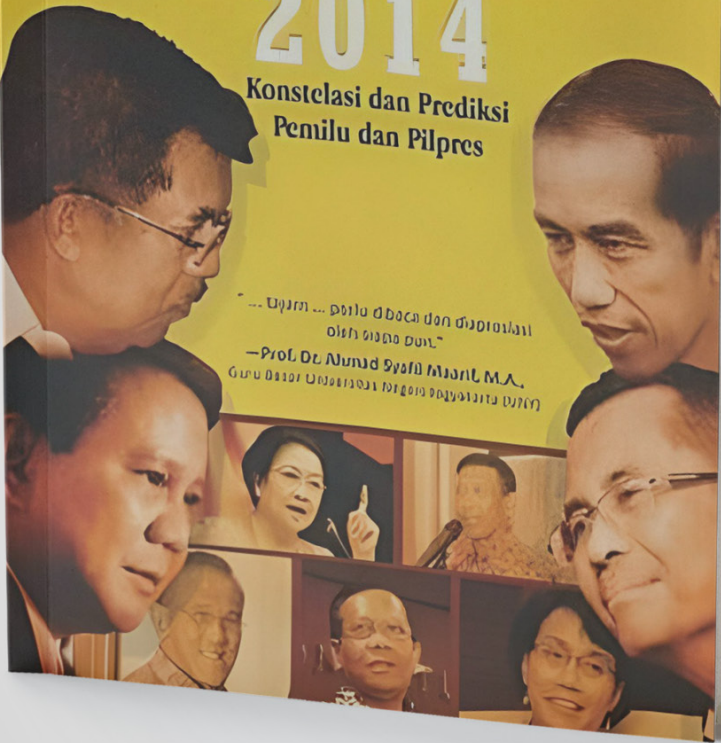
Selain sebagai pengajar dan peneliti, ia juga dikenal publik sebagai pengamat politik yang kerap muncul di berbagai media. Dia sering dimintai sebagai narasumber berbagai media cetak dan televisi untuk berbicara masalah-masalah sosial-politik. Beliau juga pernah meraih “Anugerah Media dan Komunikator Terbaik Pilpres 2009” kategori pengamat dari Strategy Public Relations. Pada tahun 2010, dia juga meraih “Charta Awards” kategori pengamat dari Charta Politika. Ratusan tulisannya muncul di berbagai koran dan majalah seperti Kompas, Majalah Tempo, Media Indonesia, The Jakarta Post, Suara Pembaruan, Republika, Koran Seputar Indonesia, dan lain-lain.

BURHANUDDIN MUHTADI
PENGLAMAT POLITIK LEJABLA SURVEI INDONESIA (LSI)

PERANG BINTANG 2014

Konstelasi dan Prediksi
Pemilu dan Pilpres

... دې کتاب ... په ښه اوښوونکي
اوښوونکي ډول
—Prof. Dr. Nurdin Syarif Muzit, M.A.,
Guru Besar Universitas Islam Indonesia





CURRICULUM VITAE

Occupation

Prof. Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D.

2010 – present

Faculty of Political and Social Sciences, Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta: Professor of Political Science

2013 – present

Indonesian Political Indicator (Indikator Politik Indonesia): Founder and Executive Director

2021 – present

Visiting Research Fellow ISEAS – Yusof Ishak Institute

Education

Australian National University

Ph.D. International, Political and Strategic Studies (2018)

Dissertation: *Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks and Winning Margins*

- Australian National University **M.A. Asian Studies Specializing in Politics (2009)**
Thesis: *Thinking Globally, Acting Locally: A Social Movement Theory Approach of the Prosperous Justice Party (PKS) and Its Islamist Transnational Framing*
- State Islamic University, Jakarta **B.A. Quranic Exegesis and Hadith (2002)**
Sub-thesis: *Farid Esack: Raison D'être Hermeneutika Pembebasan Al-Qur'an*

Honours and Awards

- 2022 Nawacita Awards in the field of democratic studies, Media Nawacita Indonesia.
- 2020 *Honourable Mention for the 2020 Asian Studies Association of Australia's Early Career Book Prize, Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery, Palgrave Macmillan, 2019*
- 2019 *Indonesian Platinum and Best Corporate Award 2019*
Awarded for the category of 'The Most Trusted Survey Institution Company of the Year.'
- 2018 *Young Southeast Asia Fellow Award*
Awarded by a consortium of North American Universities (SEAREG) to highlight the best new research by young social scientists working on Southeast Asian politics
- 2016 *The 11th Singapore Graduate Forum on Southeast Asian Studies*
Awarded by Asian Research Institute of National University of Singapore to undertake the Asian Research Scholars programme
- 2016 *Indonesia-Singapore Young Leaders Award*
Awarded from S Rajaratnam Endowment (SRE), S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), and RSIS' Indonesia Programme for emerging young leaders from Indonesia and Singapore to undertake workshop in Singapore
- 2013 *Australia Awards Scholarship for PhD Program*
Awarded from the Australian Agency for International Development

- (AusAID) to undertake doctoral program at the Australian National University
- 2010 *Charta Politika Award for the Best Political Analyst*
- 2009 *Strategic Consulting Award for the Best Political Communicator* during the 2009 Legislative and Presidential Elections
- 2008 *Australian Development Scholarship (ADS)*
Awarded from the Australian Agency for International Development (AusAID) to undertake Master Program at the Australian National University
- 2008 *The Asia Foundation Young Leaders Fellowship Grant*
Awarded from The Asia Foundation for young intellectual to support post-graduate studies

Publications

BOOKS

- 2023 Burhanuddin Muhtadi, Hui Yew-Foong and Siwage Dharma Negara, *The Indonesia National Survey Project 2022: Engaging with Developments in the Political, Economic and Social Spheres* (Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute)
- 2022 Burhanuddin Muhtadi, *The Indonesian Military Enjoys Strong Public Trust and Support: Reasons and Implications* (Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute)
- 2020 Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru (The Power of Money: Vote Buying in Post-Suharto Elections)* (Jakarta, Penerbit Gramedia)
- 2019 Burhanuddin Muhtadi, *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Vote Buying in Indonesia* (Singapore: Palgrave Macmillan)
- 2019 Burhanuddin Muhtadi, *Populisme, Politik Identitas dan Dinamika Elektoral (Populism, Identity Politics and Electoral Dynamics)* (Malang: Intrans Publishing)
- 2013 Burhanuddin Muhtadi, *Perang Bintang 2014: Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres ('Star Wars.' Constellation and Prediction of the 2014 Election and Presidential Elections)* (Jakarta: Noura Books)

- 2012 Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah (The PKS Dilemma: Between Elections and Sharia)* (Jakarta: Penerbit Gramedia)
- 2005 Burhanuddin Muhtadi, *Defisit Pelayanan Publik: Survei Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (The Deficit of Public Services: A Survey on Public Perception on Public Services)* (Jakarta: INCIS-Partnership Kemitraan)
- 2004 Burhanuddin Muhtadi, *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia (In Search of Cultural Roots of Civil Society in Indonesia)* (Jakarta: INCIS-CSSP USAID)
- 2003 Burhanuddin Muhtadi, *Civil Society dan Demokrasi: Survey tentang Partisipasi Sosial-Politik Warga Jakarta (Civil Society and Democracy: A Survey on Social-Political Participation of Jakartans)* (Jakarta: INCIS-CSSP USAID)
- 2003 Burhanuddin Muhtadi, *Syariat Islam: Pandangan Muslim Liberal (Shari'a: A Liberal Muslim Perspective)* (Jakarta: JIL-The Asia Foundation)

REFEREED JOURNAL ARTICLES

- 2023 Seth Soderborg and Burhanuddin Muhtadi, 'Resentment and Polarization in Indonesia,' *Journal of East Asian Studies* (2023), 1-29 doi:10.1017/jea.2023.1
- 2023 Burhanuddin Muhtadi and Seth Soderborg, 'Partisanship, Religion, and Social Class: Attitudes and Behaviors in the Early Stages of the Covid-19 Pandemic,' *Studia Islamika*, Vol 30, No 1 (2023): 1-38 DOI: 10.36712/sdi.v30i1.31997
- 2023 Nathanael Sumaktoyo and Burhanuddin Muhtadi, 'China's Foreign Policies and Attitudes toward Chinese Diaspora: A Direct Link?' *International Journal of Public Opinion Research*, Volume 34, Issue 4, Winter, DOI: 10.1093/ijpor/edac038
- 2022 Taberez Neyazi, Burhanuddin Muhtadi, Aaron Yi Kai Ng and Ozan Kuru, 'Who Gets Exposed to Political Misinformation in a Hybrid Media Environment? The 2019 Indonesian Presidential Election,' *Social Media & Society*.
- 2022 Burhanuddin Muhtadi, 'Religious Pluralism in Indonesia: Threats and Opportunities for Democracy,' Book review edited by Chiara Formichi, Cornell University Press, *Contemporary Southeast Asia* 44(1):157-159

- 2022 Burhanuddin Muhtadi, "The Candidate's Dilemma: Anti-corruptionism and Money Politics in Indonesian Election Campaigns," Book Review, *Asian Studies Review*, Volume 47, Issue 4.
- 2022 Taberez Neyazi, Burhanuddin Muhtadi and Sourabh B Paul, 'Political Trust, Economic Hardship and Partisanship: Explaining Leadership Approval in Indonesia during the COVID-19 Crisis,' *Asian Survey*, July DOI: 10.1525/as.2022.1651118
- 2022 Allen Hicken, Edward Aspinall, Meredith Weiss and Burhanuddin Muhtadi, 'Buying Brokers: Electoral Handouts beyond Clientelism in a Weak-party State,' *World Politics*, published by Cambridge University Press, No 1 (74)
- 2022 Nathanael Sumaktoyo and Burhanuddin Muhtadi, 'Can Religion Save Corrupt Politicians? Evidence from Indonesia', *International Journal of Public Opinion Research/IJPOR*, February, DOI: 10.1093/ijpor/edab029
- 2021 Burhanuddin Muhtadi, 'INDONESIA: State and Society in Transition,' *Pacific Affairs*, Available at <https://pacificaffairs.ubc.ca/book-reviews/indonesia-state-and-society-in-transition-by-jemma-purdey-antje-missbach-and-dave-mcrae/>
- 2021 Diego Fossati, Burhanuddin Muhtadi and Eve Warburton, "Why democrats abandon democracy: Evidence from four survey experiments," *Party Politics*, February, 1-13, <https://doi.org/10.1177/1354068821992488>
- 2021 Eve Warburton, Burhanuddin Muhtadi, Edward Aspinall, and Diego Fossati, "When does class matter? Unequal representation in Indonesian legislatures," *Third World Quarterly*, March, pp. 1-25, DOI: 10.1080/01436597.2021.1882297
- 2021 Taberez Neyazi and Burhanuddin Muhtadi, 'Selective Belief: How Partisanship Drives Belief in Fake News,' *International Journal of Communication*, 15, pp. 1286–1308. DOI: 1932–8036/20210005
- 2020 Marcus Mietzner and Burhanuddin Muhtadi, 'The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia' *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Volume 42, Number 1, April 2020, pp. 58-84,
- 2020 Burhanuddin Muhtadi and Eve Warburton, 'Inequality and Democratic Support in Indonesia' *Pacific Affairs* 93(1): 31-58, doi: <https://doi.org/10.5509/202093131>

- 2020 Diego Fossati, Edward Aspinall, Burhanuddin Muhtadi and Eve Warburton, 'Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case,' *Electoral Studies*, Vol 63, February, doi: <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102111>
- 2020 Seth Soderborg and Burhanuddin Muhtadi, 'Policy, Partisanship, and Pay: Diverging COVID-19 Responses in Indonesia.' Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3636486> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3636486>
- 2019 Burhanuddin Muhtadi, 'Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru' (Vote Buying and New Normal in Post-Authoritarian Elections) *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), 55-74, DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>
- 2019 Edward Aspinall, Diego Fossati, Burhanuddin Muhtadi and Eve Warburton, 'Elites, Masses and Democratic Decline in Indonesia,' *Democratization*, doi: 10.1080/13510347.2019.1680971
- 2018 Marcus Mietzner and Burhanuddin Muhtadi, 'Explaining the 2016 Islamist mobilisation in Indonesia: Religious intolerance, militant groups and the politics of accommodation,' *Asian Studies Review* 42 (3), 479-497, doi: <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>
- 2018 Burhanuddin Muhtadi, 'Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional' (Identity Politics and the Myth of Rational Voters)' *Jurnal MAARIF* Vol. 13, No. 2 Desember, pp. 68-86.
- 2018 Marcus Mietzner, Burhanuddin Muhtadi and Rizka Halida, 'Entrepreneurs of Grievance: Drivers and effects of Indonesia's Islamist mobilization' *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, Volume 174: Issue 2-3, doi: <https://doi.org/10.1163/22134379-17402026>
- 2015 Burhanuddin Muhtadi, 'Jokowi's First Year: A Weak President Caught between Reform and Oligarchic Politics' *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 51, Issue 3. Dec., pp. 349-368, doi: <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1110684>
- 2013 Burhanuddin Muhtadi, 'Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi antara Party ID dan Patron Klien (Vote Buying and Electoral Dynamics in Indonesia: A Preliminary Study of the Interaction between Party ID and Patron-Client)' *Jurnal Penelitian Politik* Vol 10, No 1, pp. 41-57 <https://doi.org/10.14203/jpp.v10i1.217>

- 2009 Burhanuddin Muhtadi, 'The Quest for Hizbut Tahrir Indonesia' *Asian Journal of Social Science* 37(4), pp. 623-645, doi: <https://doi.org/10.1163/156853109X460219>
- 2009 Burhanuddin Muhtadi, 'Islamism and Women in Politics: Analysing Female Political Participation and Representation of Indonesia's Prosperous Justice Party (PKS)' *Jurnal Substansia*, vol. 1, No. 1.
- 2007 Burhanuddin Muhtadi, 'The Conspiracy of Jews: The Quest for anti-Semitism in Media Dakwah' *Graduate Journal of Asia-Pacific Studies*, 5(2), 53-76. <http://www.asia-studies.com/GJAPS5.2.html>
- 2007 Burhanuddin Muhtadi, 'Yudhoyono and Kalla: Two Distinctive Styles of Policy-Making in the Case of Fuel Subsidy Reduction in Indonesia' *Asian Journal of Social Policy* Vol.3, No. 2, 2007, pp. 1-10.

BOOK CHAPTERS

- 2020 Burhanuddin Muhtadi, 'Electoral Losers, Democratic Support and Authoritarian Nostalgia' in *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression* by Thomas Power and Eve Warburton (eds) (Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute), pp. 141- 165.
- 2020 Burhanuddin Muhtadi and Rizka Halida, 'Muslim Identity and Deprivation: Socio-Psychological Sources of Support for Islamist Radical Groups in Indonesia' in *Islamic Conservatism in Indonesia: Islamic Groups and Identity Politics* by Alexander R. Arifianto, Leonard Sebastian and Syafiq Hasyim (eds) (London: Routledge).
- 2020 Burhanuddin Muhtadi, 'Populisme, Polarisasi, dan Normalitas Baru dalam Politik Elektoral Kita' (Populism, Polarization, and New Normal in Our Electoral Politics) in *Bergerak Bergerak Berdampak* by Najwa Shihab et al (Jakarta: Narasi TV)
- 2019 Marcus Mietzner and Burhanuddin Muhtadi, 'The Mobilization of Intolerance and its Trajectories: Indonesian Muslims' Views of Religious Minorities and Ethnic Chinese,' in *Contentious Belonging: The Place of Minorities in Indonesia* by Greg Fealy and Ronit Ricci (eds) (Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute) pp. 155-174.
- 2019 Burhanuddin Muhtadi, 'Violent Extremism dalam Sudut Pandang Studi Agama' (Violent Extremism from the Perspective of Religious Studies) in *Asking Sensitive Questions: Panduan Pelaksanaan Survei dengan*

- Tema Tindakan Ekstrem Berbasis Agama dan Non-Agama* (Guidelines for Conducting Surveys on Extremism Based on Religion and Non-Religion) by Philips J. Vermonte and Arya Fernandes (eds) (Jakarta: CSIS), pp. 21-30.
- 2018 Burhanuddin Muhtadi, 'Komoditas Demokrasi: Efek Sistem Pemilu terhadap Maraknya Jual Beli Suara' (Democratic Commodities: The Effects of Electoral System on the Prevalence of Vote Buying Practices) in *Pembiayaan Pemilu di Indonesia* by Mada Sukmajati dan Aditya Perdana (eds) (Jakarta: Bawaslu), pp. 95-118.
- 2015 Burhanuddin Muhtadi and Adam Kamil, 'Divided Government: Tantangan Pemerintahan Jokowi- (Divided Government: The Challenges for Jokowi Government) in *Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015: Tantangan Kabinet Kerja Memenuhi Ekspektasi* by Enny Sri Hartati et al (Jakarta: INDEF).
- 2012 Burhanuddin Muhtadi, 'Resep Machiavelli dan Defisit Kepemimpinan Transformatif' (The Machiavelli Recipe and the Deficit of Transformative Leadership) in *Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia: Sebuah Perdebatan* by Samsu Rizal Panggabean and Ihsan Ali-Fauzi (Jakarta: Paramadina) pp. 141-150.
- 2008 Burhanuddin Muhtadi, 'Ke Cak Nur, Saya Mengaji' (To Cak Nur, I Recite) in *All You Need is Love: Cak Nur di Mata Kaum Muda* by Ihsan Ali-Fauzi and Ade Armando (Jakarta, Penerbit Paramadina)
- 2007 Burhanuddin Muhtadi, 'The 1998 Student Uprising in Indonesia: A Social Movement Theory Approach' in *Enlightenment from Within* by Faried Saenong and Eko Nugroho (eds), (Canberra: Minaret)
- 2002 Burhanuddin Muhtadi, 'Tantangan Pluralisme Keagamaan dan Sistem Pendidikan Agama' (The Challenges of Religious Pluralism and the Religious Educational System) in *Pendidikan Memang Multikultural: Beberapa Gagasan* by Aryo Danusiri and Wasmi Alhaziri (eds) (Jakarta: Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET)

ADDITIONAL RESEARCH OUTPUTS

- 2023 Burhanuddin Muhtadi, 'Jokowi's High Approval Ratings Make Him Potential Kingmaker,' *ISEAS Perspective*, <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2023-38-jokowis-high-approval-ratings-make-him-potential-kingmaker-by-burhanuddin-muhtadi/>

- 2022 Burhanuddin Muhtadi, "Analyzing Public Opinion on Moving Indonesia's Capital: Demographic and Attitudinal Trends," *ISEAS Perspective*, <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2022-54-analyzing-public-opinion-on-moving-indonesias-capital-demographic-and-attitudinal-trends-by-burhanuddin-muhtadi/>
- 2022 Greg Fealy, Sally White, and Burhanuddin Muhtadi, "Counter-polarisation and political expediency," *New Mandala*, 1 July 2022, <https://www.newmandala.org/counter-polarisation-and-political-expediency/>
- 2021 Burhanuddin Muhtadi and Kennedy Muslim, 'Islamic Populism and Voting Trends in Indonesia', *ISEAS Perspective*, <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-159-islamic-populism-and-voting-trends-in-indonesia-by-burhanuddin-muhtadi-and-kennedy-muslim/>
- 2021 Seth Soderborg and Burhanuddin Muhtadi, 'When is Staying Home Partisan? Policy Conflict and Precaution-Taking during a Pandemic' <https://scholar.harvard.edu/soderborg/publications/when-staying-home-partisan-policy-conflict-and-precaution-taking-during>
- 2020 Burhanuddin Muhtadi, 'Populism, Islamism, and Democratic Decline in Indonesia,' *The Middle East Institute*, 4 August 2020 <https://www.mei.edu/publications/populism-islamism-and-democratic-decline-indonesia>
- 2020 Nathanael Sumaktoyo and Burhanuddin Muhtadi, 'How China's foreign policy shapes prejudice against Chinese Indonesians,' *New Mandala*, 5 October 2020 available at: <https://www.newmandala.org/how-chinas-foreign-policy-shapes-prejudice-against-chinese-indonesians/>
- 2019 Eve Warburton and Burhanuddin Muhtadi, 'Politicising inequality in Indonesian elections' *Brookings* (blog) 8 April 2019 at: <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/04/08/politicizing-inequality-in-indonesian-elections/m>
- 2019 Burhanuddin Muhtadi, Eve Warburton, and Aninda Dewayanti 2019, 'Perceptions of Inequality in Indonesia: A Matter of Partisan Politics?', *ISEAS Perspective* https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2019_10.pdf
- 2019 Diego Fossati, Burhanuddin Muhtadi and Eve Warburton, 'Follow the leader: personalities, policy and partisanship in Indonesia' *New Mandala*, 15 Jul, 2019, at: <https://www.newmandala.org/follow-the-leader->

- personalities-policy-and-partisanship-in-indonesia/
2018 Edward Aspinall, Diego Fossati, Burhanuddin Muhtadi and Eve Warburton, 'Mapping the Indonesian political spectrum,' *New Mandala* <http://www.newmandala.org/mapping-indonesian-political-spectrum/>
2015 Burhanuddin Muhtadi, 'Money Politics and the Prisoner's Dilemma,' *New Mandala*, 16 November 2015, at: <https://www.newmandala.org/money-politics-and-the-prisoners-dilemma/>

Invited Keynote and Speaker Addresses —

Burhanuddin Muhtadi is regularly invited to give a keynote speech or to give presentation as main speaker in seminars or conferences held by leading universities or research institutes. Below are some of his notable and relevant invited keynote talks in recent years:

1. Australian National University (ANU), "Indonesia Update: The Mobilization of Intolerance and Its Trajectories: Indonesian Muslims' Views of Religious Minorities and Ethnic Chinese," Canberra, 14-15 September 2018.
2. Caucus Fundasaun - Feto Iha Politika Timor Leste, "Perspektif Akademik: Figur Pemimpin Bangsa Yang Ideal dan Demokratis," Timor Leste, 26 August 2021
3. Basel Institute on Governance and OECD, "Ear to the Ground: First-hand Insights into what Indonesians Think about Environmental Corruption," online, 18 August 2021.
4. ISEAS – Yusof Ishak Institute, "Indonesia Forum 2021: National Politics and the Future of Decentralization," Singapore, 7 July 2021.
5. University of Sydney, Sydney Southeast Asia Centre, "Politics in Action 2021: Indonesia Update," 5 May 2021.
6. Lowy Institute, "What can we expect from Jokowi's second term?" Sydney, 9 September 2019.
7. Australian National University (ANU), "Indonesia Update 2015: Political Update" Canberra, 16-17 September 2015.
8. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), "The Horse Race: What Polling Says, Singapore," 27 March 2019.
9. American Chamber of Commerce in Indonesia, "The prospect of Indonesia's 2019 Elections," Jakarta, 14 March 2019

10. Université catholique de Louvain (UCLouvain), "Mobilization of Intolerance and its Trajectories: Indonesian Muslims' Views of Religious and Ethnic Minorities," Louvain, 15 June 2019.
11. Centre for Southeast Asian Studies (CSEAS) Kyoto University, "Buying Votes in Indonesia: Chasing Narrow Winning Margins," Kyoto, 23 April 2018.
12. Australian National University (ANU), "Indonesia Update: Electoral Losers, Democratic Support, and Authoritarian Nostalgia," Canberra, 6-7 September 2019.

Organizational Affiliation

1. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI), Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga dan Kewilayahan, 2020-2027.
2. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Dewan Pengawas Pengurus Pusat, Periode 2019 – 2023.
3. Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI), Pemimpin Redaksi dan editor in Chief, sejak 2022.
4. Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (IKALUIN), Ketua Bidang Riset dan Inovasi, Periode 2020-2024.
5. Asia-Pacific Journal of Elections and Democracy (APJED), Board of Editorial Advisor, sejak 2021.

